

**PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA  
TAHUN 1928 DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan

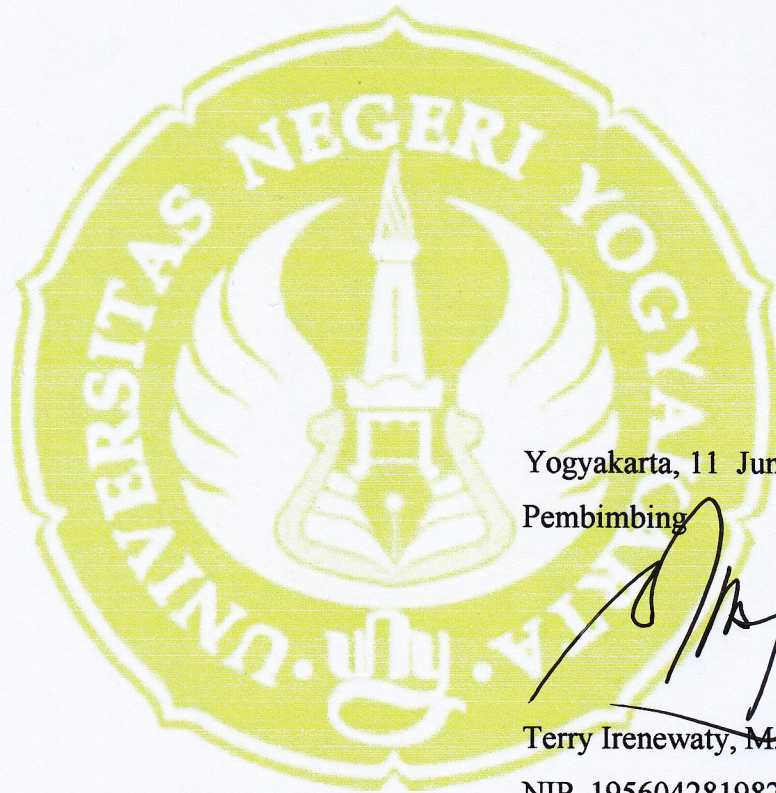


Oleh:  
**Winingsari Trimurtini**  
**11406244010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 11 Juni 2015

Pembimbing

Terry Irenewaty, M.Hum

NIP. 195604281982032003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji tanggal 23 Juni 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

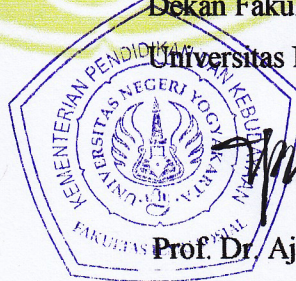
### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
M. Nur Rokhman, M.Pd	Ketua Penguji : .....		3 Juli 2015
Terry Irenewaty, M.Hum	Sekretaris .....		3 Juli 2015
Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd	Penguji Utama : .....		3 Juli 2015

Yogyakarta, 6 Juli 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winingsari Trimurtini

NIM : 11406244010

Jurusan : Pendidikan Sejarah

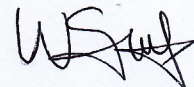
Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928  
di Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain serta diterbitkan orang lain, terkecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai sumber penulisan. Pernyataan ini peneliti buat dengan penuh kesadaran dan sesungguhnya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Peneliti



Winingsari Trimurtini  
NIM. 11406244010

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillah atas segala nikmat-Nya.

Karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tua: Bapak Budiyo Slamet dan Ibu Ambar Windarti, terimakasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang dan dukungannya disetiap hembusan nafasku.

Kakakku tercinta Nila Ika Windasari, terimakasih telah menjadi contoh untukku.

Tak lupa kubingkiskan karya kecil ini untuk:

Kerabat, sahabat, partner, teman empat tahunku Pendidikan Sejarah NR 2011.

## **MOTTO**

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. (R.A. Kartini)

Jangan pernah menyesal bertemu seseorang dalam hidup karena setiap orang selalu mengajarmu pelajaran yang penting dalam hidup. (Penulis)

Jika kamu tak berusaha mewujudkan mimpimu sendiri, maka hidupmu akan kamu habiskan untuk melihat orang lain mewujudkan mimpinya. (Penulis)

# **PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928 DI YOGYAKARTA**

Oleh:  
Winingsari Trimurtini  
NIM. 11406244010

## **ABSTRAK**

Pergerakan wanita Indonesia menjadi salah satu pergerakan nasional yang belum banyak dikaji. Pergerakan wanita Indonesia awal masa pergerakan nasional bersatu dan terkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pergerakan wanita Indonesia pada masa pergerakan nasional, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kunowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama ialah menentukan topic penelitian. Tahap kedua ialah heuristik atau pengumpulan sumber penelitian, Tahap ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat ialah tahap interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terjadi karena adanya semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang saat masa penjajahan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya mendorong terjadinya pergerakan wanita. Pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terbagi menjadi tiga periode yakni periode sebelum tahun 1920, periode tahun 1920-1930 dan periode sesudah tahun 1930 dengan latar belakang masing-masing periode yang berbeda, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama terjadi pada 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran, Yogyakarta dengan latar belakang untuk menyatukan gerakan organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Kongres berlangsung dengan berbagai agenda acara dan pertemuan serta menghasilkan beberapa keputusan penting menyangkut kehidupan wanita Indonesia, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan Indonesia selanjutnya berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga, dan Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Kata Kunci: *Kongres, pergerakan, wanita, 1928*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta” dengan baik. Sholawat serta salam yang tak pernah hentinya juga penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Penulisan skripsi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, semoga kelak akan membawa manfaat yang berlimpah bagi penulis, dan pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan rendah hati sebagai ungkapan rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan izin penelitian dan pembuatan Tugas Akhir Skripsi.

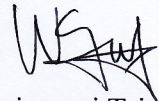


4. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi kepada penulis.
5. Ibu Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Pendidikan Sejarah yang banyak memberikan masukan.
7. Segenap staf dan pegawai Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan yang telah membantu dan melayani urusan administrasi.
8. Seluruh staf dan pegawai perpustakaan, antara lain: 1) Laboratorium dan Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah, 2) Perpustakaan Pusat UNY, 3) Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta, 4) Perpustakaan Museum Mandala Bhakti Wanitatama, 5) Perpustakaan Badan Pelestari Nilai Budaya Yogyakarta, 6) Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, 7) Perpustakaan St. Kolese Ignatius, 8) Perpustakaan I:Boekoe, 9) Perpustakaan Taman Siswa.
9. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya.
10. Teman-teman Almamaterku, terutama Pendidikan Sejarah NR 2011 UNY, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama 4 tahun di kampus yang akan menjadi kenangan tak terlupakan.
11. Teman-teman yang sering saya repotkan dalam pembuatan skripsi ini (Munandar, Suhartanti, Nur Aini, Ratri, Naya, Devi, Ike, Wandha).
12. Teman-teman seperjuangan mengejar gelar sarjana (Zulfi, Eva).

13. Teman-teman kos 6F, terimakasih untuk motivasinya (Probo, Dyah, Ayun, Mus, Astri, Imna, Vella, Lia, Lintang, Azizah).
14. Sahabat-sahabatku yang tercinta, terima kasih untuk semuanya.
15. Teman-teman Pendidikan Sejarah R 2011.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberi balasan atas kebaikan dan bantuan mereka dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 11 Juni 2015



Winingsari Trimurtini

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Historiografi yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Pendekatan Penelitian.....	17

I.    Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II PERGERAKAN WANITA MASA PERGERAKAN NASIONAL .....</b>	<b>22</b>
A.    Timbulnya Pergerakan Nasional .....	22
B.    Periode Pergerakan Wanita Indonesia .....	25
1.  Pergerakan Wanita sebelum 1920.....	25
2.  Pergerakan Wanita 1920-1930.....	32
3.  Pergerakan Wanita sesudah 1930.....	38
<b>BAB III KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928 .....</b>	<b>40</b>
A.    Latar Belakang Kongres.....	40
B.    Organisasi-organisasi pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia .....	41
C.    Pelaksanaan Kongres .....	47
D.    Hasil Kongres.....	59
<b>BAB IV PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA .....</b>	<b>61</b>
A.    Terbentuknya Badan Federasi Kongres Perempuan Indonesia Pertama .....	61
B.    Kongres Perempuan Indonesia Kedua .....	65
C.    Kongres Perempuan Indonesia Ketiga.....	71
D.    Kongres Perempuan Indonesia Keempat.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AD-ART	: Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga
BPBH	: Badan Pemberantasan Buta Huruf
BPPIP	: Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan
BPPPI	: Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan Indonesia
DHE	: <i>Dameskranje Help Elkander</i>
GAPI	: Gabungan Aksi Politik Indonesia
G.K.R	: Gusti Kanjeng Ratu
INPO	: <i>Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie</i>
JIB	: <i>Jong Islamieten Bond</i>
JIBDA	: <i>Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling</i>
KAS	: Kerajinan Amai Setia
KPI	: Kongres Perempuan Indonesia
KPKPAI	: Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia
MKD	: Mardi Kerukunan Djawi
PAPI	: Persatuan Arab Peranakan Indonesia
PAPIM	: Persatuan Arab Peranakan Indonesia Muda
PBH	: Pemberantasan Buta Huruf
PERMI	: Persatuan Muslim Indonesia

PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PI	: Pemuda Indonesia
PIKAT	: Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya
PIPB	: Persatuan Istri Pegawai <i>Bestuur</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKO	: Pertolongan Kesengsaraan Oemoem
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPI	: Perikatan Perempuan Indonesia
PPII	: Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia
PPPI	: Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia
PSI	: Partai Sarekat Islam
P.T.I	: Partai Tionghoa Indonesia
P4A	: Perlindungan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak
R.A	: Raden Ayu
SI	: Sarekat Islam
SIAP	: Sarekat Islam <i>Afdeeling</i> Pandu

## DAFTAR ISTILAH

<i>Aktief Kiesrecht</i>	: Hak Untuk Memilih
<i>Afdeeling</i>	: Cabang
<i>Androcentris</i>	: Berpusat pada peran laki-laki
<i>Andrygynous</i>	: Melibatkan peran laki-laki maupun wanita
<i>Fonds</i>	: Dana
<i>Hoofdbestuur</i>	: Pimpinan Pusat
<i>Onderstand</i>	: Tunjangan Pensiun
<i>Padvindsterij</i>	: Kepanduan Putri
<i>Passief Kiesrecht</i>	: Hak Untuk Dipilih
<i>Raad</i>	: Pengadilan
<i>Studiefonds</i>	: Dana Siswa
<i>Volksraad</i>	: Dewan Rakyat

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Panitia inti Kongres Perempuan Indonesia Pertama.....	86
Lampiran 2. R.A. Soekonto, Ketua Kongres Perempuan Indonesia Pertama.....	87
Lampiran 3. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta.	88
Lampiran 4. Diorama pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama.....	89
Lampiran 5. Dalem Joyodipuran, Tempat pelaksanaan Kongres.....	90
Lampiran 6. Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung, 1938.....	91
Lampiran 7. Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama .....	92



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesadaran nasional bukan merupakan hak dan monopoli kaum lelaki saja, namun kaum wanita pun berhak dan berkewajiban untuk ikut terjun dalam kancah perjuangan politik. Mulanya awal kebangkitan pergerakan wanita ini hanya berada di lapisan atas, tetapi kemudian dalam perkembangannya makin meluas ke lapisan bawah. Berkembangnya pergerakan ini juga dengan tujuan yang makin bertambah dan mantap.

Timbulnya pergerakan wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial wanita. Pergerakan wanita awal abad ke-20 identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu.<sup>1</sup> Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad ke-20.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita pada masa pergerakan nasional dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk

---

<sup>1</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 102.

seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo. Sebagai bagian dari organisasi induk tentu jalan pergerakan wanita harus mengikuti organisasi induk tersebut.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbul kesadaran nasional kaum wanita. Setelah itu muncul berbagai gerakan wanita lain dan semakin banyak, bahkan mulai muncul berbagai organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak wanita seperti hak mereka dalam perkawinan. Adanya perubahan ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapan wanita dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan lahir dan berkembang baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari partai politik atau organisasi lain yang anggotanya terdiri dari kaum lelaki. Perkumpulan-perkumpulan wanita ini yang merupakan pergerakan nasional bagian wanita.<sup>2</sup>

Semakin meningkatnya perjuangan nasional dan timbulnya berbagai perkumpulan atau organisasi, maka berdiri pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Demikianlah Partai Sarekat Islam (PSI) mempunyai bagian wanitanya yang bernama Wanita Oetama (kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia)<sup>3</sup>, Muhammadiyah mempunyai Aisiyah, *Jong Islamieten Bond* mempunyai *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), *Jong Java* mempunyai *Meisjeskring*,

---

<sup>2</sup> Bambang Suwondo, dkk. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 71.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pemuda Indonesia mempunyai Putri Indonesia, dan Taman Siswa dengan Wanita Taman Siswa. Kecuali perkumpulan diatas, masih terdapat beberapa perkumpulan wanita lainnya seperti Wanita Katholik (Yogyakarta), Wanita Moeljo (Yogyakarta) dan Nahdatoel Fataat (Yogyakarta).

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita tersebut, oleh karenanya guna membulatkan tekad dan mendukung persatuan Indonesia diadakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta sebagai manifestasi dari kesadaran nasional kaum wanita. Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 yang bertujuan mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita.

Kongres tersebut dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita. Perkumpulan wanita yang hadir antara lain: Putri Indonesia (Yogyakarta), Wanita Katholik (Yogyakarta), Wanita Moeljo (Yogyakarta), Wanita Utomo (Yogyakarta), Roekoen Wanidijo (Jakarta), Budi Rini (Malang), Putri Indonesia (Surabaya), Wanita Sedjati (Bandung), Putri Budi Sedjadi (Surabaya), Kesoemo Rini (Kudus), Aisiyah (Solo), Wanita Taman Siswa (Yogyakarta) dan sebagainya. Kongres ini dihadiri pula oleh perkumpulan laki-laki antara lain dari Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Pemuda Indonesia (PI), Muhammadiyah dan sebagainya.<sup>4</sup> Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini dipimpin oleh R.A. Soekonto

---

<sup>4</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 219.

sebagai ketua, St. Mundjiah sebagai wakil ketua, Siti Sukaptinah sebagai sekretaris 1, Sunaryati sebagai sekretaris II dan R.A Harjodiningrat sebagai bendahara.<sup>5</sup>

Tujuan dari diadakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Kongres ini berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan yang berkedudukan di Yogyakarta. Hasil lain dari adanya Kongres ini yakni diputuskan pula hendak mendirikan *studiefonds*<sup>6</sup> untuk anak-anak putri yang pandai tetapi tidak mampu, memberantas perkawinan anak-anak dan memajukan kepanduan untuk anak-anak putri.<sup>7</sup>

Kongres Perempuan Indonesia Pertama juga berhasil menetapkan pengurus baru. Sementara itu dengan diadakannya Kongres Perikatan Perempuan Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929 maka nama perkumpulan ini kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Demikianlah sejak adanya peristiwa tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta maka pada saat Kongres Perempuan Indonesia Ketiga tahun 1938 tanggal dan bulan tersebut diperingati sebagai hari ibu hingga sekarang.

---

<sup>5</sup> Ahmaddani G. Martha, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: Indo-Media Communication, 1992), hlm. 139.

<sup>6</sup> *Studiefonds* (dermasiswa) merupakan derma untuk para anak-anak putri yang pandai, tetapi tidak mampu untuk membayar biaya pendidikannya. Lihat dalam Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia-Indonesia, 1984), hlm. 198.

<sup>7</sup> Bambang Suwondo, *loc.cit.*

Penulis memilih Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta sebagai judul skripsi mencerminkan fokus pembahasan dalam skripsi, dimana penulis memiliki ketertarikan terhadap pergerakan politik kaum wanita pada masa tersebut. Keputusan penulis untuk membahas peran wanita bertujuan untuk menggeser dominasi penulisan sejarah politik yang *androcentris* (berpusat pada peran laki-laki) menuju rekonstruksi sejarah yang *andrygynous* (melibatkan laki-laki maupun wanita) khususnya dalam gerakan politik masa pergerakan nasional.<sup>8</sup> Alasan peneliti mengambil rentang waktu tahun 1928 dikarenakan tahun tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi kaum wanita karena saat itu dimulailah kesatuan pergerakan wanita Indonesia.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pergerakan wanita Indonesia pada masa pergerakan nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928?
3. Bagaimana perkembangan Kongres Perempuan Indonesia?

### **C. Tujuan**

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini. Dua tujuan tersebut ialah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berisikan tujuan penelitian secara umum, sedangkan tujuan khusus mengacu pada tujuan yang ada pada rumusan masalah.

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 128.

### 1. Tujuan umum

- a. Sebagai sarana mempraktikkan penerapan metodologi penelitian Sejarah yang kritis.
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah Sejarah.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

### 2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui pergerakan wanita Indonesia pada masa pergerakan nasional.
- b. Mengetahui pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928.
- c. Mengetahui perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.

### **D. Manfaat penelitian**

Ada dua manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini.

Dua manfaat tersebut ialah bagi pembaca dan bagi penulis.

#### 1. Bagi pembaca.

- a. Karya ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### 2. Bagi Penulis.

- a. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan penulis dalam merekonstruksi, menganalisis dan menyajikan suatu peristiwa sejarah dalam suatu karya ilmiah yang objektif.
- c. Melatih penulis dalam meneliti suatu peristiwa sejarah secara objektif dan kritis.

### **E. Kajian pustaka**

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang akan menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.<sup>9</sup> Hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data-data atau informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang akan dikaji. Adapun literatur yang digunakan penulis sebagai bahan kajian pustaka sebagai berikut.

Rumusan masalah pertama mengenai munculnya pergerakan wanita Indonesia. Munculnya pergerakan wanita Indonesia bahkan dimulai sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda dimana banyak tokoh wanita seperti Martha Kristina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia yang berjuang mengangkat senjata melawan Belanda. Fase perjuangan wanita yang tidak lagi mengangkat senjata tetapi melalui pemikiran dimulai sejak emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pustaka diantaranya buku karya Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto yang berjudul

---

<sup>9</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hlm. 3.

*Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda* ( $\pm$  1900-1942). Buku ini berisi tentang pergerakan wanita yang sudah dimulai dari zaman dahulu seperti Laksamana Malahayati, kemudian ada banyak pejuang wanita seperti Martha Kristina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia yang berjuang mengangkat senjata melawan Belanda. Perjuangan diteruskan oleh R.A. Kartini yang menjadi pelopor pergerakan wanita melalui pendidikan yang kemudian mendorong banyak tokoh wanita untuk membantu wanita dalam hal menggapai emansipasi<sup>10</sup>.

Selain itu digunakan juga buku terbitan A.K. Pringgodigdo yang berjudul *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Buku ini banyak membahas mengenai pergerakan wanita masa pergerakan nasional yang terbagi menjadi tiga periode yakni sebelum tahun 1920, masa tahun 1920-1930 dan setelah 1930. Pergerakan wanita pada masing-masing periode memiliki ciri-ciri masing-masing sesuai zamannya. Pergerakan wanita sebelum tahun 1920 identik dengan pergerakan pada wilayah sosial, tahun 1920-1930 mulai berorientasi politik dengan mendirikan banyak perkumpulan sedangkan periode setelah 1930 semakin jelas orientasi politiknya.

Rumusan masalah kedua yakni Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928. Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 merupakan tonggak perjuangan pergerakan wanita Indonesia. Kongres ini merupakan pembulatan tekad

---

<sup>10</sup> Emansipasi merupakan usaha meningkatkan status dan meraih peran-peran dalam masyarakat terutama di bidang politik. Lihat dalam Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda* ( $\pm$  1900-1942). (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 403.



wanita dalam mendukung persatuan Indonesia. Kongres ini sebagai manifestasi dari kesadaran nasional kaum wanita saat ini. Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pustaka buku karya Susan Blackburn yang berjudul *Kongres Perempuan Indonesia Pertama: Tinjauan Ulang*. Buku ini merupakan terbitan dari fotokopi majalah Isteri edisi Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang memuat rekam proses berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Kongres ini memuat serangkaian acara serta memiliki usulan-usulan para wanita mengenai kongres, notulensi jalannya kongres dan teks-teks pidato yang disampaikan tokoh pergerakan wanita saat itu.<sup>11</sup>

Buku lain yang juga digunakan yakni buku karya Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita yang berjudul *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Buku ini berisi rangkaian acara, pidato-pidato yang dibacakan sampai proses yang ada selama berlangsungnya acara Kongres ini. Tujuan adanya Kongres ini supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia dan dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Blackburn, Susan, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007), hlm. 158.

<sup>12</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. (Jakarta: Percetakan Negara, 1958), hlm. 19.

Rumusan masalah ketiga yakni Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia dimulai dari pembentukan federasi Kongres yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) sampai menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) berlangsung di Jakarta pada tahun 1935, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) berlangsung di Bandung tahun 1938 dan Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) tahun 1941.

Pustaka yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah ketiga ini adalah buku *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* karya Fauzie Ridjal. Buku ini memuat tentang beberapa artikel yang membahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Beberapa artikel dalam buku membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia Kedua sampai pada Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Selain menggunakan buku tersebut, rumusan masalah yang ketiga ini juga menggunakan buku *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan* yang ditulis oleh Taufik Abdullah dkk dimana dalam buku ini dibahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Perkembangan dimulai sejak didirikannya federasi kongres yakni Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia Pertama berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua sampai pada Kongres Perempuan Indonesia Keempat yang memiliki agenda tersendiri setiap kali mengadakan kongres. .

## **F. Historiografi yang relevan**

Historiografi adalah usaha merekonstruksi sejarah dengan mengerahkan seluruh daya pikiran, ketrampilan teknis, penggunaan kutipan dan catatan, serta yang paling utama adalah penggunaan pikiran kritis dan analisis yang akhirnya menghasilkan suatu sintesa dari seluruh penelitian secara utuh.<sup>13</sup>

Historiografi relevan adalah kajian-kajian historis yang telah mendahului peneliti dengan tema dan topik yang hampir sama. Historiografi yang relevan dengan skripsi ini adalah adalah skripsi karya Hajar Nur Setyowati mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "*Gerakan Politik Perempuan 1930-1941, Studi Komparasi Gerakan Politik Istri Sedar dan Kongres Perempuan Indonesia*". Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ingin penulis buat yakni fokus isi skripsi.

Skripsi tersebut membahas mengenai perbedaan gerakan politik yang dilakukan oleh Istri Sedar dan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia merupakan gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pemerintah dan berpolitik melalui perjuangan untuk memperoleh hak politik wanita dan untuk mengakomodasi kepentingan wanita dalam kebijakan-kebijakan politik. Skripsi penulis lebih menitikberatkan pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama secara umum. Pembahasan skripsi penulis berkisar pada pelaksanaan kongres, hasil kongres serta tokoh yang terlibat dalam kongres.

---

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, *loc.cit.*

Historiografi yang relevan kedua adalah skripsi karya Indah Firdaningsih mahasiswa program studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang berjudul "*Kongres Perempuan Indonesia II, 20-24 Juli 1935 di Jakarta*". Perbedaan skripsi ini dengan penulis yakni topik isi skripsi. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Kedua dimana dalam Kongres Perempuan Indonesia Kedua dibahas mengenai perburuhan, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan wanita dan anak-anak. Skripsi penulis lebih menitikberatkan pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama dan hanya mengulas sekilas mengenai Kongres Perempuan Indonesia Kedua.

#### **G. Metode dan pendekatan penelitian**

##### 1. Metode penelitian

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilai secara kritis yang dibuat dalam bentuk tulisan. Menurut Kuntowijoyo tahapan penelitian sejarah ada lima tahap yaitu <sup>14</sup>:

##### a. Pemilihan topik

Tahap awal dalam melakukan penelitian maupun penulisan yaitu menentukan topik. Penentuan topik menjadi penentu langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar peneliti fokus dalam pencarian sumber. Topik dipilih sebaiknya berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) kedekatan

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2003), hlm. 90.

intelektual. Menentukan topik tentu bukanlah hal yang mudah, dimana peneliti dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memutuskan suatu topik tertentu yang akan dikaji. Mulai dari menarik atau tidaknya suatu topik, ketersediaan sumber data, serta kesesuaian dengan disiplin ilmu yang ditekuninya.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta sebagai judul skripsi tidak terlepas dari faktor intelektual penulis sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap pergerakan politik kaum wanita. Pergerakan wanita merupakan sesuatu yang masih jarang diteliti karena sampai saat ini masih terjadi dominasi penulisan sejarah politik yang *androcentris* (berpusat pada peran laki-laki) bukan rekonstruksi sejarah yang *andrygynous* (melibatkan laki-laki maupun wanita) khususnya dalam gerakan politik masa pergerakan nasional.

b. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah. Heuristik merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan bahannya sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artifact).<sup>15</sup> Dokumen dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan artifact berupa foto-foto, bangunan, dan alat-alat.

Sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat diperoleh dari pelaku sejarah atau kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sementara sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkannya. Pada dasarnya semakin jauh waktu sumber sekunder dibuat dari peristiwa yang dikisahkan, maka sumber sekunder tersebut semakin dapat dipercaya.

#### 1) Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Sumber primer yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini yakni:

Sujatin Kartowijono. (1982). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.

#### 2) Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Penulis sumber sekunder bukanlah orang yang hadir dan menyaksikan sendiri

suatu peristiwa, ia hanya melaporkan apa yang terjadi berdasarkan kesaksian orang lain.

Sumber sekunder yang peneliti gunakan sebagai berikut:

Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.

Blackburn, Susan. (2007). *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.

Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. Jakarta: Balai Pustaka.

### c. Verifikasi

Tidak semua data yang diperoleh di lapangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Peneliti harus kritis terhadap sumber yang diperolehnya. Pengujian sumber yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan dengan data atau sumber lainnya serta dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kritik sumber yang dilakukan peneliti haruslah seobyektif mungkin, agar diperoleh data dan sumber yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya.

Verifikasi ada dua macam yaitu autentisitas (keaslian sumber), atau kritik eksteren, dan kredibilitas atau kritik intern.<sup>16</sup> Autentisitas lebih bersifat fisik,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

bukan isi dari sumber tersebut, sementara Kredibilitas lebih secara kritis terhadap isi dari sumber. Penulis menemukan sumber buku dari Kongres Wanita Indonesia berjudul *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* yang kertasnya sudah menguning dan penulisannya menggunakan mesin ketik serta berejaan lama.

d. Interpretasi

Menguraikan informasi dari data-data dan sumber yang sudah diperoleh serta sudah dipilih merupakan tahap dimana peneliti harus bisa berfikir logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Setiap sumber sejarah pasti memunculkan beberapa tafsiran berbeda dari tiap penulis. Langkah ini menuntut kecermatan obyektifitas yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menyatukan hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis yakni penggabungan atau pengelompokan sesuai dengan topik yang dibahas.

e. Historiografi

Tahap akhir dalam metode sejarah kritis yaitu penulisan (historiografi), dari serangkaian tahap itu kemudian dituangkan peneliti dalam penulisan. Dukungan sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.



## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah akan dilakukan, dimensi mana yang akan diperhatikan, unsur-unsur mana yang akan diungkapkan dan sebagainya. Penjelasan yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh pendekatan yang dilakukan. Pendekatan dalam penulisan sejarah untuk mempermudah pengkajian suatu masalah. Penelitian sejarah tidak hanya mencakup satu pendekatan saja melainkan beberapa pendekatan. Hal ini disebabkan sebagai upaya pengkajian secara multidimensional. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

### a. Pendekatan Sosiologis

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan social.<sup>17</sup> Sosiologi adalah suatu ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengungkap unsur sosial, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan dan sistem sosial.<sup>18</sup>

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat interaksi dalam masyarakat serta konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat lebih dalam sistem sosial

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 18.

<sup>18</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 87.

yang berlaku dan melingkupi ruang gerak wanita masa itu. Pendekatan sosiologis dapat membantu menganalisa sebab munculnya gerakan wanita masa pergerakan sesuai kondisi sosial masyarakat masa itu.

b. Pendekatan Antropologi

Antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya<sup>19</sup>. Antropologi mempelajari organisasi hubungan manusia sosial dan budaya, sistem keturunan dan hubungan kekerabatan, spiritualitas dan religi, lembaga, konflik sosial, dan lain-lain. Antropologi digunakan ketika menelaah sistem budaya yang ada di Yogyakarta. Melalui antropologi akan dibahas tentang tradisi yang sedang berkembang saat itu. Ini penting karena di Jawa masih sangat menjunjung tinggi faktor-faktor budaya yang dimilikinya. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin menelusuri dan melihat lebih dalam mengenai aspek pengalaman tokoh dalam menciptakan suatu perubahan kebudayaan.

c. Pendekatan Psikologis.

Psikologi berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu.<sup>20</sup> Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang teraplikasikan dalam tindakan manusia sehari-hari. Pendekatan

---

<sup>19</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 163.

<sup>20</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 1.

psikologis membantu peneliti dalam melihat sisi psikologis dari semua tokoh pergerakan wanita yang melahirkan segala tindakan pada masa pergerakan nasional. Perilaku seseorang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yakni dorongan dari dalam diri untuk melakukan perubahan sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari luar atau kemasyarakatan seperti ekonomi, histori, maupun perubahan teknologi.

d. Pendekatan Politik

Politik adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).<sup>21</sup> Pendekatan politik adalah sebagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik mengandung konsep-konsep tentang tata negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan politik untuk menerangkan bentuk gerakan politik kaum wanita.

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 14.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang isi dari penelitian ilmiah atau skripsi. Skripsi yang berjudul “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta” sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II PERGERAKAN WANITA INDONESIA MASA PERGERAKAN NASIONAL**

Bab kedua berisi proses munculnya gerakan wanita masa pergerakan nasional. Pembahasan mengenai timbulnya pergerakan nasional Indonesia dan fase gerakan wanita Indonesia. Fase gerakan wanita dimulai sebelum tahun 1920, saat tahun 1920-1930 dan setelah tahun 1930.

### **BAB III KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928**

Bab ketiga berisi latar belakang terjadinya Kongres Perempuan Indonesia Pertama sebagai upaya pergerakan wanita pada masa pergerakan nasional Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia Pertama menjadi tonggak pergerakan wanita untuk ikut bergabung dalam ranah pergerakan nasional Indonesia. Selain itu juga dibahas mengenai pelaksanaan dan hasil dari Kongres ini.

#### BAB IV PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA

Bab keempat membahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia setelah terjadinya Kongres Pertama di Yogyakarta. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia dimulai dari pembentukan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) sampai diubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) sampai pada kontribusi organisasi ini pada Dewan Rakyat. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama yakni Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) tahun 1935, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) tahun 1938 sampai pada Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) tahun 1941.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

## **BAB II**

### **PERGERAKAN WANITA MASA PERGERAKAN NASIONAL**

#### **A. Timbulnya Pergerakan Nasional.**

Abad ke XIX terjadi perubahan politik dalam pemerintahan kolonial Belanda. Muncul tokoh Van Deventer dengan gagasan Politik Etis<sup>1</sup>. Pemikiran itu didukung oleh kaum demokrat liberal yang pada akhirnya membuat pemerintah harus membentuk lembaga pendidikan. Pemerintah lalu membuka sekolah untuk mendidik calon-calon pekerja yang terlatih dan terampil pada bidang pekerjaan yang diperlukan. Pendidikan itu kecuali memberi latihan praktis pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan demi meningkatkan derajat dan persamaan kedudukan dalam masyarakat.

Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Faktor gerakan kemerdekaan muncul dari luar negeri dan dalam negeri. Upaya untuk membebaskan diri dari penjajah sangat sulit jika hanya dengan mengandalkan kekuatan kedaerahan saja. Terjadi banyak kekalahan membuat Indonesia semakin menderita dengan perjanjian yang dibuat untuk melemahkan kekuasaan pribumi. Kekalahan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya persatuan dan kesatuan, sifat perjuangan yang masih

---

<sup>1</sup> Politik Etis merupakan ide dari Van Deventer yang berpendapat bahwa Indonesia telah berjasa membantu keuangan pemerintah Belanda. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila kebaikan budi orang Indonesia dibayar kembali. Upaya pemulihan kembali Indonesia melalui trias yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Lihat dalam Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 16-17.

kedaerahan hanya mementingkan daerahnya sendiri, belum adanya organisasi nasional dan hanya mengandalkan kekuatan fisik.

Faktor penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan menimbulkan rasa Nasionalisme pada rakyat Indonesia. Tekanan dan penderitaan mengakibatkan adanya rasa senasib diantara masyarakat Indonesia yang menghendaki menentukan nasib sendiri bebas dari penjajahan. Rasa nasionalisme membuat strategi perlawanan diubah dari kekuatan fisik menjadi kekuatan pikiran (diplomasi). Strategi perlawanan menggunakan pikiran tidak bisa lepas dari peran pemerintah Belanda sendiri yang memberikan kesempatan kepada pribumi untuk sekolah. Kaum pribumi diberi kesempatan belajar disekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan Politik Etis.

Hasil dari adanya pendidikan itu adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Mereka melihat bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memajukan masyarakat dan salah satu syarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah meningkatkan derajat wanita.<sup>2</sup>

Usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan melalui wanita ini telah dirintis oleh Kartini dengan ide-ide yang cemerlang dan Dewi Sartika yang mendirikan sekolah untuk wanita. Jauh sebelum waktu tersebut, telah berdiri beberapa organisasi wanita,

---

<sup>2</sup> Leiriza, R.Z. dkk, *Sejarah Pemikiran tentang Sumpah Pemuda*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989), hlm 123.

baik secara perorangan maupun kelompok terbatas yang semuanya mempunyai tujuan ingin memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo tidaklah berarti perubahan terjadi pada kaum pria saja tetapi perbaikan itu juga menyangkut perbaikan kaum wanita, karena bagaimanapun wanita mempunyai peranan yang besar dalam keluarga sebagai istri dan ibu anak-anaknya. Kaum wanita pun bangkit dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita.

Tanggal 3 September 1912, Cipto Mangunkusumo mendirikan *studieclub* dengan nama Kartini di kota Malang. Tidak tanpa alasan Cipto menggunakan nama Kartini sebagai *studieclub*nya. Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa tujuan Kartini bukan semata-mata untuk menggalang suatu gerakan wanita, tetapi untuk membangkitkan rakyat Indonesia yang tertidur berabad-abad lamanya.<sup>3</sup> Itulah sebabnya maka nama Kartini diperuntukkan sebagai lambang kesadaran nasional dan lambang cita-cita yang mulia. Ia adalah pembangkit kesadaran nasional, oleh karena itu nama Kartini digunakan sebagai nama *studieclub*nya yang anggotanya bukan hanya wanita saja bahkan sebagian besar adalah pria.

Hakekatnya kesadaran nasional tidaklah identik dengan politik menentang penjajahan. Politik menentang penjajahan hanyalah salah satu manifestasi kesadaran

---

<sup>3</sup> Slamet Mulyono, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Djilid III*. (Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1969), hlm 120.



nasional. Pokok terpenting ialah usaha untuk ikut serta memajukan bangsa.<sup>4</sup> Semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang ini telah membawa pengaruh yang besar pada kaum wanita pribumi. Sama seperti kaum laki-laki mereka tumbuh kesadarannya akan situasi dan kondisi hidup dalam masyarakat yang terjajah.<sup>5</sup> Mereka menyadari berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia khususnya kaum wanita. Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya.

## **B. Periode Pergerakan Wanita Indonesia.**

### **1. Pergerakan Wanita sebelum tahun 1920.**

Munculnya pergerakan wanita bahkan terjadi sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda dimana banyak tokoh wanita seperti Martha Kristina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia yang berjuang mengangkat senjata melawan Belanda.<sup>6</sup> Fase perjuangan wanita yang tidak lagi mengangkat senjata tetapi melalui pemikiran dimulai sejak emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini.

Pergerakan wanita awal abad XX identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 121.

<sup>5</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm 411.

<sup>6</sup> Kongres Perempuan Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Perempuan Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 2.

peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu.<sup>7</sup> Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad XX. Soal-soal politik seperti hak pemilihan sama sekali tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki-laki pun tidak mempunyai hak, soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh.<sup>8</sup>

Faham tentang budi pekerti, keagamaan dan adat, masih menjadi rintangan terbesar bagi wanita untuk dapat bertindak ke arah lebih jauh. Sebab pertama yang mendorong wanita untuk bergerak ialah faham tentang kedudukan wanita dalam perkawinan dan hidup keluarga.<sup>9</sup> Sebab-sebab tersebut ialah kawin paksaan (wanita banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal, dalam segala hal hanya boleh bilang ya saja), poligami (dulu boleh dikatakan biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan (seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan istrinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang dicerai), adat kebiasaan tetap-tinggal-di-rumah (gadis-gadis

---

<sup>7</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 102.

<sup>8</sup> Pringgodigdo, A.K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hlm 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah). Inilah sebab-sebab dalam masa pertama yang menggerakkan wanita dari lapisan atas.<sup>10</sup>

Walau pergerakan wanita pada masa permulaan itu adalah merupakan gerak perorangan dan tidak dalam susunan perkumpulan, namun itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan. Gerakan orang seorang itu berkembang menjadi organisasi perjuangan wanita yang berkembang sesuai perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu.<sup>11</sup> Seiring dengan itu, diusahakan pula pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak gadis untuk mempertinggi derajat sosial, di samping untuk menambah kecakapan dan ketrampilan sebagai ibu dan sebagai pemegang rumah tangga.<sup>12</sup>

R.A Kartini menjadi pelopor gerakan wanita saat beliau mulai menulis tentang kehidupan, cita-cita, ide, dan pemikiran yang diungkapkan melalui surat-suratnya. Hal ini mendorong banyak tokoh wanita mulai mengikuti jejak R.A Kartini seperti Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis dan Rahmah El Yunussiyah yang banyak membantu wanita dalam hal menggapai emansipasi.

Pikiran-pikiran Kartini mengenai kepentingan kaum wanita didukung oleh kaum terpelajar bahkan golongan demokrat dalam pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1912 di Jakarta Puteri Mardika berdiri atas bantuan Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memajukan pengajaran anak-anak wanita dengan jalan memberi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Leiriza, R.Z. dkk, *op.cit*, hlm 124.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 125.

penerangan dan sokongan uang<sup>13</sup>, disamping mempertinggi sikap yang merdeka dan tegak dan melepaskan tindak malu-malu yang melewati batas.<sup>14</sup> Walaupun Putri Mardika tidak berumur panjang, pengaruhnya cukup besar terhadap kaum wanita pribumi yang berpendidikan.<sup>15</sup> Tahun itu pula atas prakarsa Ny. Van Deventer (penganjur politik etis) *Kartini fonds* (dana Kartini) didirikan.

Seiring dengan itu berdiri pula badan-badan yang mengadakan sekolah-sekolah Kartini di berbagai tempat. Sekolah Kartini didirikan di Semarang dan Jakarta tahun 1913, Madiun tahun 1914, Malang dan Cirebon tahun 1916, Pekalongan tahun 1917, Surabaya, Rembang dan Indramayu tahun 1918. Sedangkan di Jepara lebih awal telah didirikan Sekolah Kartini yang dipimpin langsung R.A. Kartini dan saudara-saudaranya.<sup>16</sup>

Setelah berdiri organisasi wanita tersebut, ternyata di daerah-daerah lain juga berdiri organisasi wanita dengan tujuan yang sama. Pada tahun-tahun berikutnya berdiri perkumpulan-perkumpulan wanita seperti Kautaman Istri yang tujuannya mengadakan rumah-rumah sekolah untuk wanita. Kautaman Istri di Tasikmalaya didirikan tahun 1913 dan kemudian diikuti dengan Kautaman Istri di Sumedang dan Cianjur tahun 1916, Ciamis tahun 1917, Cicurug tahun 1918, Kuningan tahun 1922

---

<sup>13</sup> Pringgodigdo, A.K, *op.cit.*, hlm 23.

<sup>14</sup> Leiriza, R.Z. dkk, *op.cit.*, hlm 127.

<sup>15</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm 412.

<sup>16</sup> Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 56.

dan Sukabumi tahun 1926. Tahun 1915 Kautaman Istri juga berdiri di Padang Panjang atas prakarsa lulusan Kautaman Istri di Jawa Barat.<sup>17</sup> Kalau di Jawa Barat muncul Dewi Sartika sebagai tokoh wanita yang banyak mengikuti jejak Kartini, tidak ketinggalan juga Rohannah Kudus yang pada tanggal 11 Februari 1914 mendirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di kota Gadang, Sumatera Barat.<sup>18</sup>

Terdapat banyak tempat-tempat dengan perkumpulan-perkumpulan kaum ibu yang memajukan kecakapan wanita yang khusus (memasak, mejahit, merenda, pemeliharaan orang beranak, pemeliharaan anak-anak dsb). Latihan untuk mencapai kecakapan tadi dilakukan bersama antara lain oleh perkumpulan-perkumpulan seperti Pawiyatan Wanito (Magelang 1915), Wanito Susilo (Pemalang 1918), dan Wanito Hadi (Jejara 1915). Perkumpulan ini juga merapatkan pergaulan dan mempererat persaudaraan antara kaum ibu.<sup>19</sup>

Tujuan dari perkumpulan-perkumpulan wanita pada masa itu (1904-1920) adalah perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan-kecakapan khusus untuk wanita.<sup>20</sup> Perubahan yang terjadi setelah adanya usaha dari perkumpulan-perkumpulan wanita ini akhirnya tampak juga. Sistem poligami, kawin paksa

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Pringgodigdo, A.K, *loc.cit*.

<sup>20</sup> Leiriza, R.Z. dkk, *loc.cit*.

berlakunya suami yang tidak terbatas dalam perceraian membiarkan bodoh gadis-gadis setelah remaja oleh beberapa sebab mulai berkurang. Perubahan seperti itu bukan saja mendatangkan perbaikan nasib kaum wanita melainkan juga menambah kesanggupan dan kecakapannya bertindak dalam suasana organisasi.<sup>21</sup>

Melihat keadaan yang semakin baik, banyak kaum wanita dengan sukarela menjadi anggota perkumpulan. Jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak dan mereka pun bersedia untuk menjadi bagian wanita dari perkumpulan kaum pria. Hal ini disebabkan karena kemajuan kecakapan yang dicapai, termasuk kecakapan bertindak dalam organisasi dan juga tumbuhnya perkumpulan wanita kecil yang berdiri sendiri.<sup>22</sup> Saat itu tampak berkembang berbagai corak budaya dalam tubuh perkumpulan wanita.

Pergerakan wanita dalam permulaan adalah gerak orang seorang, sebagai aksi dari beberapa orang wanita sendiri-sendiri, tidak dalam susunan perkumpulan. Corak pergerakan wanita dalam masa pertama ini bisa disebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, dan memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan-kecakapan wanita yang khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan dengan pelan-pelan dan tidak pernah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 128.

menyerang, wanita dari masa pertama ini umumnya tidak menentang agama Islam atau kaum laki-laki atau pemerintah jajahan.<sup>23</sup>

Perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia semula juga bersifat apolitis maksudnya tidak ikut mencampuri urusan politik. Sifatnya sosial ekonomis.<sup>24</sup> Aliran politik yang dianutnya dengan sendirinya sama dengan aliran politik perkumpulan induknya. Seiring waktu sifat sosial ekonomis itu lambat laun hilang, setelah perkumpulan wanita itu menjadi bagian dari gerakan nasional.<sup>25</sup> Semula para anggota perkumpulan itu berkumpul untuk merundingkan soal-soal yang bersifat sosial. Sejak timbulnya gagasan pembentukan barisan kulit berwarna untuk dihadapkan kepada pemerintah kolonial, maka sifat perkumpulan wanita itu berubah. Perkumpulan wanita terbawa arus politik.<sup>26</sup>

Sejak tahun 1917 mulai berdiri organisasi politik dan tidak ketinggalan pula wanita ikut terjun dalam perjuangan menuju cita-cita Indonesia Merdeka. Oleh karena itu banyak berdiri organisasi wanita yang mengarah ke perjuangan di bidang politik, seperti Sarekat Siti Fatimah di Garut berdiri tahun 1918 yang merupakan bagian dari SI<sup>27</sup>. Tidak kalah pentingnya dan perlu dicatat yaitu pada tanggal 22 April 1917 Muhammadiyah mendirikan Aisyah di Yogyakarta dan 8 Juli 1917 didirikan PIKAT

---

<sup>23</sup> Pringgodigdo, A.K, *op.cit.*, hlm 24.

<sup>24</sup> Slamet Mulyono, *loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Sudiyo, *loc.cit.*

(Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) oleh Maria Walanda Maramis di Manado.<sup>28</sup> Pergerakan wanita tersebut masih bergerak dibidang sosial-budaya dan sosial-religius.

## **2. Pergerakan Wanita tahun 1920-1930.**

Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang ingin melangkah ke arah pergerakan politik. Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita pada masa pergerakan nasional dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo. Sebagai bagian dari organisasi induk tentu jalan pergerakan wanita harus mengikuti organisasi induk tersebut.

Sementara itu beberapa organisasi wanita dapat kita lihat mempunyai corak yang lain dari sekedar perkumpulan wanita. Organisasi tersebut adalah bagian wanita dari perkumpulan kaum pria yang telah terbentuk sebelumnya. Organisasi ini ada yang berhaluan politik tetapi ada juga yang tidak mencampuri urusan politik seperti induk perkumpulannya.<sup>29</sup>

Perkumpulan wanita yang menjadi bagian dari suatu perkumpulan induk mengemban tugas bahwa wanita sebagai pusat keluarga di rumah dan sebagai pendidik anak-anak turunannya adalah suatu faktor yang berharga sekali untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Leiriza, R.Z. dkk, *loc.cit.*



penyebar cita-cita. Bagian wanita ini dalam penyebaran cita-cita perkumpulan induknya tentu saja lebih menekankan pada mempertinggi hal-hal yang khusus mengenai kewanitaan.<sup>30</sup>

Sesuai dengan tuntutan zaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbul kesadaran nasional kaum wanita. Setelah itu muncul berbagai gerakan wanita lain dan semakin banyak, bahkan mulai muncul berbagai organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak wanita terutama dalam hak berpolitik. Adanya perubahan ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapan wanita dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan lahir dan berkembang baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari partai politik atau organisasi lain yang anggotanya terdiri dari kaum lelaki. Perkumpulan-perkumpulan wanita ini yang merupakan pergerakan nasional.

Setelah tahun 1920 memang dapat dilihat bahwa keadaan lekas berubah baik poligami, kawin paksaan, berlakunya kekuasaan suami yang tidak terbatas terhadap perceraian, membiarkan bodoh gadis-gadis akibat larangan menyekolahkanya setelah mulai dewasa, perkawinan anak-anak dan sebagainya, di lapisan atas dari masyarakat oleh beberapa sebab telah mulai berkurang. Sebabnya antara lain ialah perluasan jumlah sekolah, makin perlunya gadis-gadis diberikan kesempatan untuk menuntut pelajaran (agar tetap mudah kemungkinan mencari suami) karena anak laki-laki dapat pelajaran lebih baik, hilangnya faham-faham sempit tentang anak wanita bersekolah. Makin luasnya pendirian adalah juga akibat propaganda oleh beberapa

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 129.

organisasi kaum laki-laki yang juga menyetujui perluasan pengajaran anak wanita (diantaranya Budi Utomo).<sup>31</sup>

Jika pergerakan wanita hanya ditentukan untuk lapisan atas saja dengan tujuan yang sama, maka sesudah beberapa puluh tahun tidak perlu lagi (keadaan kemasyarakatan lapisan atas tentu telah berubah dan berbeda, sehingga apa yang dahulu barang biasa dalam kalangan itu sesudah 15-20 tahun telah menjadi kecuali) tetapi pergerakan wanita mengenai dan menuju ke semua lapisan rakyat dan tujuannya bertambah.<sup>32</sup>

Perubahan keadaan menjadi baik seperti tersebut diatas, bukan saja mendatangkan perbaikan nasib wanita di golongan-golongan ataspun menambah kesanggupan dan kecakapannya bertindak dalam suasana organisasi, oleh karena itu jumlah perkumpulan wanita bertambah dan kaum wanitapun juga lebih bersedia dan cakap untuk menjadi bagian wanita dari perkumpulan-perkumpulan. Sebab kesempatan belajar makin berkembang ke lapisan masyarakat bawah, maka wanita-wanita yang sanggup beraksipun juga menunjukkan perluasan ke lapisan masyarakat bawah pula.

Perkumpulan wanita yang didirikan tahun 1920-1930 dapat dibagi menjadi:

1. Perkumpulan yang menjadi bagian wanita dari partai politik atau perkumpulan pergerakan yang sudah ada misalnya: bagian wanita dari SI

---

<sup>31</sup> Pringgodigdo, A.K, *op.cit.*, hlm 110.

<sup>32</sup> *Ibid.*

yakni Wanudiyo Utomo yang kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia, dari Muhammadiyah yakni Aisyiyah.

2. Perkumpulan dari wanita terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepandaian puteri yang khusus, misalnya Wanito Utomo di Yogyakarta, Wanito Mulyo, Putri Budi Sejati dan sebagainya.
3. Organisasi pemuda terpelajar yang merupakan bagian dari perkumpulan pemuda yang sudah berdiri misalnya Taman Siswa bagian Wanita, Putri Indonesia bagian dari Pemuda Indonesia, dan *Jong Java* bagian gadis (*Meisjeskring*).<sup>33</sup>

Ketiga jenis perkumpulan (militer, sosial, pemuda terpelajar) walau memiliki sedikit perbedaan corak budayanya namun semuanya dapat bekerja sama. Sampai tahun 1926 hampir semua organisasi wanita itu dapat menerima paham Indonesia bersatu dan kemudian bersama-sama menyetujui anjuran dan panggilan kebangsaan.<sup>34</sup>

Sesudah tahun 1920 kita dapat melihat jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak sekali, sedang Partai Komunis Indonesia (PKI), Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah dan Sarekat Ambon mempunyai bagian wanita. Perkumpulan-perkumpulan ini mengerti, bahwa wanita sebagai pusat keluarga rumah (yaitu bentuk golongan sosial yang terkecil) dan sebagai pendidik turunan adalah suatu faktor yang

---

<sup>33</sup> Bambang Suwondo, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 102.

<sup>34</sup> *Ibid.*

berharga sekali untuk penyebar cita-cita.<sup>35</sup> Bagian wanita tadi dalam penyebaran cita-cita tentu saja dengan sendirinya mempertinggi hal-hal yang khusus mengenai kewanitaan.

Kongres PKI di Jakarta 7-10 Juni 1924 menyediakan satu hari untuk gerakan wanita komunis dimana pada hari itu orang wanita komunis membicarakan kewajiban kaum wanita dalam perjuangan menentang kaum modal.<sup>36</sup> Bagian SI wanita adalah Wanudijo Utomo kemudian Sarekat Perempuan Islam Indonesia. Bagian wanita Muhammadiyah adalah Aisyah yang juga tidak mencampuri politik seperti Muhammadiyah. Perkumpulan ini dalam tahun 1929 telah mempunyai 5000an anggota tersebar dalam 47 cabang dan 50 kring dan mempunyai 32 rumah sekolah wanita dengan 75 guru puteri.<sup>37</sup> Wanodyo Utomo berdiri di Yogyakarta tahun 1920 yang akhirnya menjadi Sarekat Putri Islam tahun 1925. Pada tahun 1920 berdiri *Gorontalo'sche Mohammedaansche Vrouwen Vereening* di Gorontalo dan Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukit Tinggi<sup>38</sup> serta Nahdatul Fa'at sebagai bagian dari Wal Fadjri.<sup>39</sup>

Bagian wanita Sarekat Ambon, Ina Tuni, membantu aksi Sarekat Ambon di kalangan orang militer Ambon, bagian wanita ini berhaluan politik seperti Sarekat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *loc.cit*.

<sup>39</sup> Sudiyo, *loc.cit*.

Ambon juga. Telah disebutkan diatas bahwa oleh karena kemajuan kecakapan bertindak dalam susunan organisasi, lain daripada bagian wanita tersebut, pun juga jumlah perkumpulan wanita kecil-kecil yang berdiri sendiri sesudah 1920 sangat bertambah. Hampir disemua tempat yang agak penting ada perkumpulan wanita, di kota yang besar tiap-tiap bagian kota yang didiami banyak pegawai negeri terdapat perkumpulan kaum ibu.<sup>40</sup>

Perkumpulan-perkumpulan ini seperti yang ada sebelum 1920 adalah perkumpulan-perkumpulan penghibur dengan kesempatan untuk belajar kepandaian-kepandaian putri yang khusus. Hanya dimana terdapat wanita yang agak terpelajar, perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai tujuan yang nyata, diantaranya Wanito Utomo, Wanita Muljo, Wanita Katolik yang semuanya berdiri di Yogyakarta kira-kira tahun 1920 dan sebagainya.<sup>41</sup>

Jenis perhimpunan wanita yang ketiga adalah organisasi-organisasi pemudi-pemudi terpelajar, seperti Puteri Indonesia, JIBDA, *Jong Java* bagian wanita, organisasi wanita Taman Siswa. Dengan sendirinya dalam perkumpulan pemuda-pemuda inilah yang terutama dapat diterima faham Indonesia Bersatu yang dihidupkan oleh Pemuda Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tetapi juga dalam perkumpulan kaum ibu (jenis ke 2) dan dalam bagian wanita pergerakan laki-laki (jenis 1) anjuran dan panggilan kebangsaan mendapat persetujuan.

---

<sup>40</sup> Pringgodigdo, A.K, *op.cit*, hlm 112.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Kemudian menjelang Sumpah Pemuda yaitu tahun 1928 berdiri organisasi-organisasi Perempuan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan DHE (*Dameskransje Help Elkander*) di Jakarta. Untuk DHE ini terus berubah nama menjadi Organisasi Sahati.<sup>42</sup> Sejalan dengan pergerakan pemuda maka setelah Kongres Pemuda II juga diadakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama (KPI I).

### **3. Pergerakan Wanita sesudah tahun 1930.**

Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya, yaitu dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional baik yang dilancarkan dalam Mosi Soetardjo tahun 1936 maupun Tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 tentang Indonesia Berparlemen.<sup>43</sup>

Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah terdapat organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri seperti Istri Sedar, Istri Indonesia dan Putri Budi Sedjati. Gerakan wanita juga sudah mulai memperkaya wilayah gerak organisasi wanita termasuk keterlibatan dalam wilayah politik sebagaimana dilakukan oleh Istri Sedar. Berdirinya Istri Sedar bersamaan dengan tindakan represif pemerintah atas radikalisme organisasi pergerakan yang berhaluan nonkooperatif.<sup>44</sup>

Tidak adanya perkumpulan wanita yang sealiran, puteri-puteri muda dibawah pimpinan Nona Suwarni Djojoseputro tanggal 22 Maret 1930 di Bandung mendirikan

---

<sup>42</sup> Sudiyo, *op.cit.*, hlm 57.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>44</sup> Pringgodigdo, A.K., *op.cit*, hal 196.

Istri Sedar. Istri Sedar keluar dari kongres akibat perdebatan sengit dengan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) bagian wanita mengenai undang-undang perkawinan. Istri Sedar benar-benar menuntut emansipasi sepenuhnya bagi kaum wanita.<sup>45</sup>

Perkumpulan ini menuju pada kesadaran wanita Indonesia dan derajat hidup Indonesia, untuk melekaskan dan menyempurnakan Indonesia Merdeka. Istri Sedar berdiri netral terhadap agama apapun dan dibangun untuk kaum wanita terpelajar dan dari rakyat jelata bersama-sama sebagai organisasi yang tidak akan terjun dalam lapangan politik langsung.<sup>46</sup>

Sementara itu terdorong oleh keinginan untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang sama atau hampir sama agar terbentuk tenaga yang lebih kuat maka beberapa perkumpulan wanita kecil-kecil yang semuanya tidak berdasar agama dalam bulan Juni 1932 menggabungkan diri dalam satu organisasi dengan nama Istri Indonesia. Istri Indonesia bertujuan mencapai Indonesia Raya. Asasnya nasionalisme dan demokrasi.<sup>47</sup>

Demikianlah ternyata kesadaran politik sudah tumbuh dalam hati nurani wanita. Kaum wanita ternyata tidak mau ketinggalan dalam gerakan nasional. Diantara perkumpulan wanita tersebut tetap ada yang bergerak di bidang sosial seperti Aisyah dan Pasundan Istri.

---

<sup>45</sup> Slamet Mulyono, *op.cit.*, hlm 124.

<sup>46</sup> Pringgodigdo, A.K, *loc.cit.*

<sup>47</sup> Slamet Mulyono, *loc.cit.*

### **BAB III**

## **KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928**

#### **A. Latar Belakang Kongres.**

Tahun 1920-an kebangkitan nasionalisme yang cepat berhasil menghimpun kekuatan di tengah masyarakat Indonesia. Di kalangan wanita keinginan untuk menyelenggarakan dan memajukan persatuan di antara organisasi-organisasi wanita mulai berkembang di tahun 1920-an. Dalam konferensi-konferensi lain yang diselenggarakan lebih awal tahun 1928 kaum wanita didesak untuk membentuk federasi nasional. Konferensi PNI bulan Januari ada seorang pembicara wanita merekomendasikan pembentukan federasi wanita nasional Indonesia.

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, kaum wanita yang aktif dalam organisasi-organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat persatuan dan kesatuan yang terus berkembang menjadi dasar bagi meningkatnya semangat dan kesadaran nasional.<sup>1</sup>

Diilhami hal tersebut, para guru muda pendiri cabang Putri Indonesia di Yogyakarta mempunyai gagasan untuk membentuk sebuah pertemuan dan panitia kongres, yakni Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta dan atas inisiatif tujuh organisasi wanita. Tujuh organisasi wanita tersebut yakni Wanita Taman Siswa,

---

<sup>1</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm 417.



Wanita Utomo, JIBDA, *Jong Java* bagian Wanita, Wanita Katholik, Aisyiyah dan Putri Indonesia. Salah satu hal yang menyolok dalam kongres tersebut adanya tekad para wanita peserta untuk membentuk federasi demi kepentingan bersama walaupun adanya perbedaan pandangan diantara mereka.

## **B. Organisasi-organisasi pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia.**

### 1. Wanita Taman Siswa.

Ketika Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, kaum wanita di lingkungan perguruan tersebut pun membentuk kesatuan yang dinamakan Wanita Taman Siswa. Pemrakarsanya adalah R.A Suwardi Suryaningrat (Nyi Hajar Dewantara). Ia dibantu oleh Rumsiah, Djumilah, Siti Marsidah dan Sutatmo.<sup>2</sup> Keanggotaannya mula-mula hanya terbatas pada ibu pamong dan istri pamong dalam lingkungan Taman Siswa sendiri.<sup>3</sup>

Sebagai organisasi yang otonom, maka tata kehidupan Wanita Taman Siswa diatur dalam Peraturan Besar Wanita Taman Siswa. Sedang mengenai hubungan tata kerja dengan organisasi antara Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan Badan Pusat Wanita Taman Siswa diatur dengan suatu

---

<sup>2</sup> Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm 20.

<sup>3</sup> *Ibid.*

surat keputusan bersama sebagai hasil pemikiran bersama antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Adapun semboyan dari Wanita Taman Siswa ialah *Suci Tata Ngesti Tunggal*<sup>5</sup>. Asas dan tujuannya sama dengan Perguruan Taman Siswa yaitu memajukan pendidikan. Dalam hal ini terutama adalah pendidikan bagi kaum wanita. Selain itu, diusahakan untuk memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Taman Siswa dengan organisasi wanita lainnya.

## 2. Wanita Utomo.

Para pengurus besar Budi Utomo pada tanggal 24 April 1921 mendirikan perkumpulan khusus wanita di Yogyakarta yang dinamakan Wanito Utomo. Organisasi ini tidak khusus untuk para istri anggota Budi Utomo tetapi juga menerima wanita-wanita lain di luar Budi Utomo yang berminat. Organisasi ini pada mulanya hanya berkecimpung dalam bidang kesejahteraan wanita dan sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuka kursus yang diadakan di rumah-rumah pimpinan perkumpulan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Suci Tata Ngesti Tunggal* bermakna bersatu, tertib dan disiplin yang berarti kesucian batin dan ketertiban hidup menuju kesatuan. Lihat dalam Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978) hlm. 20-21.

<sup>6</sup> G.A. Ohorella, *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), hlm 17.

Tujuannya adalah memajukan keterampilan wanita sesuai dengan tuntutan zaman (sebagai istri dan sebagai ibu) dan membina persaudaraan untuk tolong menolong. Adapun kegiatannya antara lain mencari dana dengan mengadakan bazar dan hasilnya disumbangkan ke rumah sakit PKO (Pertolongan Kesengsaraan Oemoem) Muhammadiyah, memberi sumbangan kepada *studiefonds* Darmo Woro dan mengutus seorang anggota pengurus Wanito Utomo ke sekolah tenun di Bandung yang kemudian mendirikan pertenenan Wanita Utomo sendiri di Yogyakarta.<sup>7</sup>

Pernah menjadi pengurus

Pelindung : G.K.R (Gusti Kanjeng Ratu) Dewi

Ketua : R.A. Rio Gondoatmodjo

Penulis : Roro Suwarti

Anggota-anggota : R.A. Abdulkadir

R.A. Soekonto

### 3. *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA).

*Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA) adalah bagian wanita dari *Jong Islamieten Bond* (JIB). JIBDA didirikan pada tahun 1925 di Jakarta. Sejak didirikan tahun 1925 sampai 1930, JIBDA berstatus semi otonom, tetapi setelah 1931 menjadi berstatus otonom.<sup>8</sup> Keanggotaan JIB dan JIBDA adalah mereka yang berumur 15 sampai 35 tahun. Umumnya

---

<sup>7</sup> Kongres Wanita Indonesia, *loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 23.

anggota JIB/JIBDA adalah pelajar dan mahasiswa yang mendapat pendidikan Barat dan lain-lain dan tidak ada dari kalangan pesantren atau madrasah.<sup>9</sup> Cabang-cabang JIB terdapat hampir di seluruh Indonesia terutama di kota-kota besar (Ibu Kota Provinsi dan Karesidenan). Di luar Pulau Jawa antara lain terdapat di Kotaraja, Medan, Padang, Bukittinggi, Palembang, Makassar, Gorontalo, Manado dan Ambon.<sup>10</sup>

Asas dan tujuannya sama dengan JIB yaitu memajukan kaum muda Indonesia berdasarkan ajaran Islam dan membangkitkan kesadaran kebangsaan. JIBDA juga meyakini bahwa dalam Islam wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat. Oleh karena itu, kaum wanita Islam perlu dilatih agar menjadi wanita Islam sejati dan membela hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup> Adapun kegiatannya menyelenggarakan kursus-kursus keagamaan dan keterampilan wanita. JIBDA diketuai oleh Nyonya Rangkayo Datuk Tumenggung. Tokoh-tokoh lain dari JIBDA diantaranya Sukaptinah dan Emma Puradiredja.

#### 4. *Jong Java* Bagian Wanita (*Jong Java Dames Afdeeling*).

Tahun 1924 didirikan cabang *Jong Java* di Salatiga yang anggotanya khusus terdiri dari putri-putri dengan nama *Jong Java Dames Afdeeling*. Ketua di Salatiga adalah Badiyah. Sedangkan di tempat lain, keanggotaan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm 415.

*Jong Java* terdiri dari putra dan putri dan anggota putri merupakan seksi dari *Jong Java* dengan nama *Jong Java Meisjeskring*.<sup>12</sup>

5. Wanita Katholik.

Kaum wanita yang beragama Katholik pun tidak mau tinggal diam. Mereka membentuk organisasi yang diberi nama Wanita Katholik di Yogyakarta tanggal 26 Juni 1924 yang didirikan oleh R.A. Maria Sulastri Darmosaputro Sosroningrat. Rapat pendirian dilakukan di Biara para suster Ordo Santo Fransiskus di Kidul Loji yang dikunjungi oleh 120 orang.<sup>13</sup>

Setelah Wanita Katholik terbentuk, segera berdiri cabang-cabangnya di tempat-tempat yang banyak warga Katholik. Jumlah cabang ada 8 yakni Yogyakarta, Solo, Klaten, Semarang, Magelang, Muntilan, Ganjuran dan Surabaya.<sup>14</sup> Asas Wanita Katholik ialah agama Katholik sedangkan tujuan organisasi ini adalah memberi kesadaran kepada para anggotanya agar menjadi warga gereja dan warga negara yang baik.<sup>15</sup>

6. Aisyiyah.

Aisyiyah didirikan tanggal 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tanggal 22 April 1917 di Yogyakarta dengan maksud dan tujuan didirikannya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Aisyiyah juga

---

<sup>12</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit*, hlm 24.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm 416.

menjalankan ajaran agama Islam yang murni yang dapat membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat dan membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi serta bermasyarakat, karena kesadaran beragama menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat.<sup>16</sup>

Aisyiyah berkeyakinan bahwa dengan berorganisasi, bermacam-macam usaha sosial dapat dilakukan. Aisyiyah berusaha meningkatkan akhlak budi pekerti yang luhur. Pimpinan Pusat Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta. Amal usaha Aisyiyah meliputi: bagian pendidikan dan pengajaran, bagian dakwah (pendidikan dan pengajaran diluar sekolah), bagian pertolongan, dan bekerja sama baik dengan organisasi Islam maupun non Islam.<sup>17</sup>

#### 7. Putri Indonesia.

Di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta didirikan juga bagian putri dengan nama Putri Indonesia. Tujuannya sama dengan Pemuda Indonesia yakni memperkuat dan mengembangkan semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. Anggota Putri Indonesia umumnya adalah gadis-gadis yang pernah berpendidikan Barat.<sup>18</sup>

Pengurus Putri Indonesia di Yogyakarta terdiri dari:

Ketua : Sujatin.

---

<sup>16</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *loc.cit.*

Penulis : Ismudiati.

Bendahara : Sukaptinah.

### **C. Pelaksanaan Kongres**

Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta. Kongres ini diprakarsai oleh tiga orang tokoh wanita yakni: R.A. Soekonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa dan Sujatin dari Putri Indonesia.<sup>19</sup> Kongres ini dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita.

Gagasan untuk mengadakan kongres berasal dari kelompok guru muda yang sebelumnya menjadi anggota *Jong Java*, yang kemudian mendirikan Putri Indonesia di Yogyakarta tahun 1926. Pemilihan tempat di Yogyakarta didasarkan pada lingkungan tempat para pemrakarsa tinggal. Para pemrakarsa Kongres memiliki lingkungan kenalan yang saling berkaitan. R.A. Soekonto dan Nyi Hajar Dewantoro saling berkaitan terutama karena R.A. Soekonto merupakan kakak dari Ali Sastroamidjojo sedangkan Nyi Hajar Dewantoro adalah istri dari Ki Hajar Dewantoro. Kedekatan Ali Sastroamidjojo dan Ki Hajar Dewantoro selama di Belanda menghubungkan kedua wanita tersebut. Sedangkan Sujatin sendiri merupakan merupakan anggota *Jong Java* yang turut serta mendirikan Putri

---

<sup>19</sup> Sagimun, M D, *Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), hlm 181.

Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh prakarsa ini lah yang menjadi dominan mengapa penyelenggaraan kongres dilakukan di Yogyakarta.<sup>20</sup>

Tahun 1920-an Pemerintah kolonial Belanda mempersulit penyelenggaraan suatu kongres maka penyelenggaraan kongres pertama ini juga demikian. Tidak mengherankan jika para peserta mempunyai hubungan pribadi dengan salah satu penyelenggaranya. Daftar wanita dan organisasi yang terbat dalam kongres dapat dikatakan menyerupai lingkaran yang saling tumpang tindih. Walaupun ketiga wanita pemrakarsa kongres adalah anggota organisasi nonreligius, namun mereka bekerja sama dengan organisasi wanita religius dalam menyiapkan kongres dia.<sup>21</sup>

Kongres diadakan di sebuah pendopo milik bangsawan bernama R.T. Joyodipoero, salah seorang pegawai Sultan dan lebih dikenal sebagai pendukung kesenian Jawa. Pendopo rumahnya yang sangat besar tidak hanya digunakan untuk pertunjukan seni, namun juga untuk pertemuan partai-partai politik. Pertemuan saat itu hanya dapat diselenggarakan dalam ruangan tertutup, kecuali jika sebelumnya telah mendapat izin dari pemerintah kolonial.<sup>22</sup>

Laporan tentang pertemuan tersebut mencatat bahwa sekitar 1000 orang hadir pada resepsi yang diadakan malam tanggal 22 Desember. Di samping resepsi, dalam

---

<sup>20</sup> Susan Blackburn, *Kongres Wanita Pertama: Tinjauan Ulang*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007), hlm. xxviii-xxxii.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. xxxii-xxxiii.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. xxxi.



tiga pertemuan terbuka berikutnya selama berlangsungnya kongres, yang hadir antara 750 sampai 1000 orang.<sup>23</sup>

Tabel 1  
Organisasi-organisasi yang mengirimkan utusan ke Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928

Nama	Cabang yang diwakili
Aisyiyah	Pengurus Pusat (Yogyakarta) dan Solo
Budi Rini	Malang
Budi Wanito	Solo
Darmo Laksmi	Salatiga
<i>Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling</i> (JIBDA)	Jakarta, Tegal dan Yogyakarta.
Jong Java	Yogyakarta, Jakarta dan Salatiga
Karti Woro	Solo
Kesoemo Rini	Kudus
Marginging Kautaman	Kemayoran
Natdatoel Fataat	Yogyakarta
Panti-Krido-Wanito	Pekalongan
Putri Budi Sedjati	Surabaya
Putri Indonesia	Yogyakarta, dan Surabaya,
Rukun Wanodiyo	Jakarta
Santjaya Rini	Solo
Sarekat Islam Bagian Istri	Surabaya
Wanita Katholik	Solo dan Yogyakarta
Wanita Kencono	Banjarnegara
Wanita Utomo	Yogyakarta
Wanita Muljo	Yogyakarta
Wanita Sedjati	Bandung
Wanita Taman Siswa	Yogyakarta

Sumber: Susan Blackburn (2007), hlm. xxv.

Walau catatan kongres menyatakan bahwa ada 30 organisasi mengirimkan utusan, kenyataannya sebagian merupakan cabang dari organisasi yang sama. Dilihat jumlah organisasi yang terlibat dan hadir di kongres, kongres tidak dapat mengklaim

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. xx.

mewakili semua organisasi wanita Indonesia karena dapat dikatakan didominasi oleh etnis Jawa. Bukan hanya terbatasnya keterwakilan daerah-daerah di Indonesia dalam kongres tersebut, namun juga jajaran organisasi wanita yang hadir juga sangat terbatas. Selain sayap wanita organisasi nasional yang besar, kebanyakan organisasi yang hadir tidak terlalu dikenal.<sup>24</sup>

Kongres juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi yang tidak dapat hadir. Organisasi tersebut tidak hadir karena beberapa sebab dan mereka mengirim telegram. Organisasi tersebut yakni Kaum Ibu Sumatra, Kautaman Istri Sumatra, Wanita Utama Bogor, Putri Pemuda Sumatra, Jakarta, Perserikatan Marsudi Rukun Jakarta, Dewan Pimpinan Majelis Ulama dan Pemuda Sumatra, Jakarta.<sup>25</sup> Jika dilihat jumlah organisasi yang terlibat dan hadir di kongres, kongres tidak dapat mengklaim mewakili semua organisasi wanita Indonesia.<sup>26</sup>

Perkumpulan laki-laki yang hadir antara lain dari Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia (*Hoofdb*<sup>27</sup>) Pimpinan Pusat, C.P.P.P.B.D, Pemuda Indonesia (*Hoofdb*) Pimpinan Pusat, Pemuda Indonesia (*afd*<sup>28</sup>) cabang, Partai Syarikat Islam (Yogyakarta), Mardi Kerukunan Djawi (MKD), *Jong Java* (Yogyakarta), Walfadjri (*Hoofdb*) Pimpinan Pusat, Persaudaraan Arab Peranakan Indonesia (PAPI), P.S.A,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. xxii-xxvii.

<sup>25</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 419.

<sup>26</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm. xxiv.

<sup>27</sup> Singkatan dari kata *Hoofdbestuur* yang berarti Pimpinan Pusat.

<sup>28</sup> Singkatan dari kata *Afdeeling* yang berarti cabang.

Partai Tionghoa Indonesia (P.T.I), Jong Madura, Muhammadiyah (*Hoofdb*), *Jong Java* Djakarta, *Jong Islamieten Bond* (*Hoofdb*), Persatuan Arab Peranakan Indonesia Muda (PAPIM), P.S.D, Sangkara Muda, *Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie* (I.N.P.O), Sarekat Islam Afdeeling Pandu (S.I.A.P). Juga wakil dari pers dan pemerintah.<sup>29</sup> Pers disaat itu memberikan peliputan yang simpatik terhadap kongres, bahkan ada yang menulis materinya secara luas seperti surat kabar lokal Jawa, *Sedijo Tomo* yang menyatakan kagum terhadap hasil-hasil kongres.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan umur, wanita yang hadir dalam kongres mewakili wanita Indonesia masa itu. Kebanyakan dari mereka berumur dua puluhan lebih sedikit. Umur mereka mencerminkan tingkat pendidikan modern di saat itu. Kebanyakan peserta memiliki pendidikan modern sangat baik bahkan banyak diantaranya memiliki pendidikan menengah dan sebagian memiliki pelatihan sebagai guru sehingga tergolong penduduk paling berprivilese. Jika dibandingkan dengan kongres setelahnya kongres ini didominasi oleh wanita muda dan berasal dari keluarga Jawa yang tergolong menengah keatas.<sup>31</sup>

Acara kongres ini berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Setiap malam berlangsung acara pertemuan dan persidangan tertutup antara utusan tamu, anggota komite pusat dan subseksi sedangkan setiap siang hari

---

<sup>29</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. (Jakarta: Percetakan Negara, 1958), hlm 20.

<sup>30</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm. xx.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. xxvii-xxxiv.

dilakukan persidangan umum dengan acara pembacaan pidato-pidato dari masing-masing utusan. Acara-acara tersebut yakni:

1. Malam minggu 22 Desember 1928.

Acara dimulai dengan resepsi yang mulai pukul 19.00-20.30 dengan agenda acara panembromo oleh gadis-gadis dilanjutkan dengan Paduan suara anak-anak dari Taman Siswa. Para utusan laki-laki turut ambil bagian dengan membacakan kata sambutan. Setelah itu dilanjutkan dengan Pantomim dan Tableau-tableu (gambaran hidup) yang melukiskan peristiwa-peristiwa tertentu yakni: Dewi Sinta membakar diri, Srikandi serta dari Perikatan Istri Indonesia.

Setelah dilakukan penyambutan dalam unsur Jawa, penulis membacakan telegram-telegram ucapan selamat kepada Kongres.<sup>32</sup> Setelah dibacakan telegram para utusan diberi kesempatan untuk melihat dan membeli barang-barang pameran. Pukul 21.00-23.00 dilakukan pertemuan antara utusan tamu, anggota komite pusat dan subseksi (tiap utusan harus menguraikan asas perkumpulan masing-masing).

2. Minggu pagi 23 Desember 1928.

Pukul 08.30-12.00 dilakukan persidangan umum. Rapat dibuka oleh ketua yakni R.A. Soekonto dilanjutkan Panembromo oleh anak-anak dari Siswa Praja (anak-anak Aisyiyah) dalam bahasa Arab dan Indonesia yang bermaksud memberi ucapan selamat datang dan mendoakan keberhasilan kongres.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *loc.cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

Acara dilanjutkan dengan pidato-pidato yakni:

- a. Keterangan Asas Kongres oleh sdr St. Soekaptinah (KPI).
- b. Derajat dan Harga Diri Perempuan Jawa oleh R.A. Sudirman utusan dari Putri Budi Sejati (Surabaya).
- c. Derajat Perempuan oleh sdr St Mundjiah (Aisyiyah).
- d. Adab Perempuan oleh Nyi Hajar Dewantara.
- e. Perkawinan dan Perceraian oleh utusan dari Putri Budi Sejati (Surabaya).
- f. Perkawinan Anak-anak oleh sdr Mugarumah.<sup>34</sup>

3. Malam senin, 23 Desember 1928.

Malam senin dilakukan persidangan tertutup mulai pukul 20.00 untuk utusan masing-masing, anggota komite pusat dan subseksi.

4. Senin pagi 24 Desember 1928.

Acara dimulai pukul 08.30-12.00 dengan dilakukan persidangan umum dengan ceramah-ceramah:

- a. Kewajiban dan Ideal Perempuan Indonesia oleh Sdr St Soendari.
- b. Bagaimanakah Jalan Kaum Perempuan Sekarang dan yang akan Datang?  
Oleh Sdr Tien Sastrowirjo.
- c. Perempuan dan Masyarakat oleh Sdr Moersadi (Wanita Katholik).
- d. Pemeliharaan Anak-anak oleh utusan dari Wanito Utomo.
- e. Salah Satu Kewajiban Perempuan oleh utusan dari Rukun Wanodiyo.

---

<sup>34</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 274.

5. Malam Selasa 24 Desember 1928

Agenda yang dilakukan pada malam tersebut yakni persidangan tertutup yang dimulai pukul 20.00.

6. Selasa pagi 25 Desember 1928.

Acara dimulai pukul 08.30-12.00 dilakukan persidangan umum dengan pembicara rapat:

- a. Pekerjaan Sosial oleh sdr St Marjam.
- b. Gambaran Seorang Ibu Rumah Tangga oleh utusan dari Wanita Sejati (Bandung).
- c. Kemajuan Kaum Perempuan dan lain-lainnya oleh utusan dari Wanita Mulyo.
- d. Persatuan Manusia oleh sdr St Hajinah (Aisyiyah).<sup>35</sup>

Selain itu ada pula beberapa orang yang dengan singkat menyambung atau menambah pidato-pidato yang ada. Kemudian R.A. Soekonto selaku ketua menutup rapat terakhir dengan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan mengucapkan selamat pulang kepada mereka yang datang dari jauh. Beliau juga berdoa semoga Kongres Perempuan Indonesia ini betul-betul berhasil dan sukses.<sup>36</sup>

Disamping acara tersebut terdapat beberapa usulan yang diajukan kepada Panitia. Usulan tersebut berasal dari beberapa organisasi yang hadir. Usulan tersebut berasal dari Komite Pusat, Rukun Wanodiyo Weltevreden, Panti-Krido-Wanita Pekalongan,

---

<sup>35</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm. 19-20.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 21.

JIB, Natdatoel Fataat dan dari Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan inti usulan demi kemajuan KPI sebagai federasi dari organisasi wanita.

Usulan dari Komite Pusat yakni supaya KPI menjadi suatu badan permufakatan untuk segala masalah wanita Indonesia dengan peraturannya sama seperti perkumpulan biasa. Usulan lain yakni supaya badan permufakatan ini mengeluarkan surat kabar untuk menghubungkan pengurus dan anggota dengan redaksi diangkat sesuai dengan tempat tinggal pengurus.

Komite Pusat juga mengusulkan supaya mendirikan sebuah yayasan yang menyediakan dana pendidikan untuk anak-anak gadis yang pintar dan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah dan tinggi, tetapi tidak mampu untuk membiayai uang sekolah. KPI juga diminta mengajukan mosi kepada pemerintah, yaitu agar pemerintah mengeluarkan surat keputusan untuk memberi tunjangan kepada janda dan anak-anak yatim selama-lamanya.

Usulan lain datang dari Rukun Wanodiyo Weltevreden. Rukun Wanodiyo Weltevreden mengusulkan supaya KPI menjadi kesatuan semua kaum wanita di Indonesia dan meminta supaya setelah menguraikan asas-asas masing-masing organisasi, dalam permusyawaratan besar dilarang mempersoalkan tentang agama.

Salah satu utusan lain yakni Panti-Krido-Wanita dari Pekalongan juga mengajukan suatu usulan. Usulan dari Panti-Krido-Wanita yakni agar KPI mendirikan suatu majelis yang mengikat persaudaraan dan semua organisasi wanita yang tergabung dalam majelis itu saling menolong. Majelis itu dinamakan Majelis

Perikatan Putri Indonesia.<sup>37</sup> Untuk melancarkan komunikasi diharapkan KPI mengeluarkan surat kabar sebagai alat berkorespondensi dengan ongkosnya ditanggung oleh perhimpunan bersama-sama.

Usulan lain datang dari Jong Islamieten Bond (JIB). Usulan tersebut yakni supaya KPI membuat mosi kepada majelis agama untuk menguatkan hak wanita yang telah tersebut dalam agama Islam. KPI diharapkan dapat mendirikan yayasan atau mengadakan kursus tentang kebersihan supaya anggota-anggotanya atau peserta-pesertanya juga dapat mengajarkan ke kampung-kampung atau desa-desa.

Natdatoel Fataat sebagai salah satu utusan tidak mau ketinggalan dalam menyampaikan usulan dalam kongres. Menurut Natdatoel Fataat karena kaum wanita belum mempunyai suatu badan pendidikan untuk anak-anak gadis, maka mereka mohon supaya KPI mendirikan badan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, mereka juga mengusulkan supaya anak-anak gadis dimasukkan ke dalam kegiatan pramuka.

Selain itu, daerah yang sudah mempunyai perkumpulan wanita supaya mengusahakan berdirinya pramuka/kepanduan. Usulan lain berkaitan dengan urusan perkawinan yakni supaya taklik perkawinan ditambah lagi dengan: jika laki-laki menjalankan 5M (madon, madat, maling, main dan mabuk) dan sudah diperingatkan istrinya tetapi tidak berhenti, penghulu memberi izin *rafa'* kepada wanita itu atau menjatuhkan talak yang pertama. Laki-laki yang menjatuhkan talak agar memberitahukan kepada istrinya terlebih dahulu serta jangan menjatuhkan talak

---

<sup>37</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm 132.



sesuka hatinya sendiri. Anak juga menjadi tanggungan bapak bukan hanya tanggungan ibunya saja.<sup>38</sup>

Usulan menarik datang dari Aisyiyah. Aisyiyah mengusulkan supaya KPI menjadi suatu badan perhimpunan yang anggotanya terdiri dari perkumpulan wanita se-Hindia Timur yang mau dan setuju. KPI menjadi perantara persatuan antara perkumpulan yang satu dengan yang lainnya, menjadi hakim pemisah kalau ada perselisihan antar perkumpulan dan menunjukkan jalan kemajuan yang utama dan sempurna kepada perkumpulan yang sudah menjadi anggota. Upaya untuk mendukung hal tersebut yakni setiap tahun mengadakan kongres, menerbitkan surat kabar dan lain-lain upaya yang dapat mencapai tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Pidato-pidato yang dikemukakan di dalam kongres pada dasarnya mengenai kemajuan wanita yang akhirnya mengarah pada kerjasama atau perjuangan bersama kaum laki-laki untuk mencapai persatuan bangsa.<sup>40</sup> Hak-hak perkawinan dibicarakan dalam sejumlah pidato oleh wanita anggota organisasi yang tidak berlandaskan agama. Kebanyakan dari pembicara menekankan pentingnya pendidikan modern bagi gadis muda. Para pembicaranya mengangkat gagasan dan gayanya sendiri dengan sangat terbuka, mereka menampilkan suka cita dengan kebhinekaan mereka.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 131-133.

<sup>40</sup> G.A. Ohorella, *op.cit.*, hlm 21.

<sup>41</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm. xliii.

Hal menarik dari pidato-pidato dalam kongres ini bukan hanya isinya yang berbeda-beda namun juga karena adanya aneka ragam gaya. Masing-masing pembicara mempunyai latar belakang tradisi bicara yang berlainan dan memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengalaman berbicara di depan umum.<sup>42</sup>

Hal menarik lainnya dalam pidato-pidato tersebut adalah beragamnya gaya pidato. Gaya pidato mencerminkan gaya tulis surat kabar Indonesia masa itu, khotbah Islam dan juga gaya berpidato para pemimpin nasional.<sup>43</sup> Para pembicara yang lebih berpengalaman terlihat berbicara panjang, sedangkan wanita lainnya dengan gugup berpidato di depan para peserta.

Selanjutnya diskusi yang dihadiri juga oleh kaum laki-laki mengambil keputusan-keputusan yang pada dasarnya berpangkal pada kedudukan kaum wanita dalam kehidupan.<sup>44</sup> Selain itu ada hal yang menarik yakni tidak adanya penggunaan kata wanita dalam setiap pidato, padahal sebagian organisasi menggunakan kata wanita sebagai nama organisasi mereka. Kata wanita dengan segala konotasinya dianggap lebih halus dan lebih dekat dengan golongan terhormat sedangkan kenyataannya belum umum dipakai dalam bahasa Indonesia saat itu. Baru pada masa kemerdekaan kata wanita digunakan secara luas.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. xxxvi.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm, xxxix.

<sup>44</sup> G.A. Ohorella, *op.cit.*, hlm 22.

<sup>45</sup> Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm. xlii.

#### D. Hasil Kongres

Sebelum kongres, beberapa usulan telah diajukan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan. Walaupun tidak diketahui apa yang telah terjadi dalam sidang-sidang tertutup, suasana kongres menjadi jelas ketika usul-usul awal itu dibandingkan. Semua organisasi yang terlibat dengan jelas menginginkan dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan.

Tujuan dari diadakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Selain itu supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia dan dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita.<sup>46</sup>

Kongres ini berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). PPI merupakan organisasi seperti perkumpulan biasa, yaitu dipimpin oleh Pengurus Harian sedikitnya terdiri dari Ketua, Penulis, Bendahara dan dua orang Komissaris. Kontribusi sebagai anggota PPI yang dikeluarkan sedikitnya 1 f-.

Selain itu PPI juga akan menerbitkan surat kabar<sup>47</sup> yang redaksinya dipercayakan kepada Pengurus yang beranggotakan Nyi Hajar Dewantara, Hajinah, Nyonya Ali Sastroamidjojo, Ismudijati, Badiah, Sunarjati. Tempat kedudukan pengurus menurut

---

<sup>46</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>47</sup> Surat kabar ini bernama *Isteri* yang terbit lima bulan setelah Kongres Perempuan Indonesia Pertama tepatnya pada tanggal 9 Mei 1929 dengan tarif langganan f. 1,50,- untuk masa berlangganan 1 tahun, f. 0,90,- untuk setengah tahun dan f. 0,20,- untuk tiga bulan. Lihat dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Hajar Nur Setyowati, *Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa*. (Jakarta: I:BOEKOE, 2008), hlm. 96.

banyaknya anggota, artinya tempat yang paling banyak mempunyai perkumpulan mempunyai hak untuk menjadi tempat kedudukan pengurus. Keputusan yakni Yogyakarta menjadi tempat kedudukan pengurus.

Hasil lain dari adanya kongres ini yakni diputuskan hendak mendirikan *studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu, dan memperkuat pendidikan *padvindsterij* (kepanduan putri).<sup>48</sup> Selain itu kongres berkeputusan untuk mencegah perkawinan anak-anak dengan cara tiap anggota harus membuat propaganda tentang buruknya perkawinan anak-anak dan minta tolong kepada pegawai Pamong Praja supaya memberi penerangan kepada rakyat tentang hal ini.

Kongres juga mengirimkan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar secepatnya diadakan *fonds* bagi janda dan anak-anak, tunjangan bersifat pensiun (*onderstand*) jangan dicabut dan sekolah putri diperbanyak. Serta mengirimkan mosi kepada Raad Agama (Pengadilan Agama) agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.<sup>49</sup>

Pada akhir kongres, sebuah anggaran dasar dan rencana aksi untuk PPI telah disusun dan disetujui. Anggaran dasar ini menyatakan bahwa PPI bermaksud menjadi badan penghubung bagi semua perkumpulan wanita Indonesia. Anggota PPI akan terdiri dari organisasi yang memiliki anggaran dasar yang biasa dan para anggotanya adalah wanita Indonesia asli.

---

<sup>48</sup> Bambang Suwondo, *loc.cit.*

<sup>49</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm 22.

## **BAB IV**

### **PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA**

#### **A. Terbentuknya Badan Federasi Kongres Perempuan Indonesia Pertama.**

Salah satu hasil dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yakni dibentuknya suatu federasi baru bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). PPI yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1928 mempunyai usaha-usaha untuk mengadakan Kongres pada setiap tahun untuk memperbincangkan kedudukan wanita Indonesia, menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk memperbincangkan soal-soal wanita dan menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggota yang berselisih.

Tempat kedudukan pengurus ditetapkan menurut jumlah banyaknya anggota, untuk pertama kalinya Yogyakarta menjadi tempat kedudukan pengurus. Susunan pengurus PPI tahun 1928 sama seperti pada KPI dengan ketua R.A. Soekonto dari Wanita Utomo dan wakil ketua Sujatin. Serta para pemrakarsa yang lain duduk sebagai dewan pengurus.<sup>1</sup> Keanggotaan belum sepenuhnya diatur sehingga ada kemungkinan beberapa cabang dari satu organisasi menjadi anggota, seperti Aisyiyah dari Yogyakarta dan Solo, JIBDA dari Yogyakarta dan Tegal, dan Wanita Katholik dari Yogyakarta dan Solo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm 35.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 36.

PPI mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada Mei 1929. Isu perkawinan menjadi topik pokok pembicaraan. Kemudian dari tanggal 28-31 Desember 1929 di Jakarta di adakan Kongres PPI II dengan pimpinan R.A. Soekonto dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi anggota.<sup>3</sup> Kongres mengadakan beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Perubahan AD-ART salah satunya yakni dicantumkan bahwa yang menjadi anggota PPI adalah pusat-pusat organisasi wanita bukan cabang-cabang.<sup>4</sup> Bentuk badan hukum dan namanya diubah. Nama federasi sebelumnya Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).<sup>5</sup>

Antara KPI I dan KPI II diadakan 3 kali Kongres PPII. Kongres berlangsung pada 13-18 Desember 1930 di Surabaya, 25-29 Maret 1932 di Solo, dan 6-8 Mei 1933 di Jakarta.<sup>6</sup> PPII bermaksud menjadi gabungan organisasi wanita Indonesia. PPII berazaskan kebangsaan bukan agama dan politik, menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia, menjunjung tinggi kewanitaan dan meneguhkan iman.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. Dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 272.

<sup>5</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 36-44.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 38.

Hal yang selalu mendapat perhatian pada setiap Kongres ialah:

- a. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam).
- b. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.
- c. Mencegah perkawinan anak-anak.
- d. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Khususnya bagi anak-anak gadis didirikan yayasan "Seri Derma" untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya.<sup>8</sup>

Guna memperkuat perlawanan terhadap perdagangan wanita dibentuk P4A (Perlindungan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak)<sup>9</sup> yang beranggotakan kaum pria dan wanita. PPII menyadari perdagangan wanita dan pelacuran berhubungan langsung dengan kemiskinan penduduk tani (yang waktu itu tenggelam dalam utang) dan buruknya kondisi kerja kaum buruh wanita pada umumnya.<sup>10</sup>

Pidato-pidato yang ada pada Kongres PPI 1930 yakni:

1. Pergerakan Perempuan di Asia oleh S. Soeparto.
2. Hal Kesusilaan oleh Soekati.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>9</sup> Perkumpulan ini didirikan tahun 1932 dan berkedudukan di Yogyakarta dengan ketua terpilih Ny Sunaryati Sukemi. Lihat dalam Taufik Abdullah, dkk (ed), *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2010), hlm. 372.

<sup>10</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 136.

### 3. Pemberantasan Buta Huruf sebagai Syarat Kemajuan Bangsa oleh Soekirno.<sup>11</sup>

Tahun-tahun setelah Kongres 1933, PPII memperkuat warna nasionalisnya. Dipengaruhi Istri Sedar, Kongres PPII 1932 memberikan dukungan lebih kuat terhadap gagasan bahwa wanita harus mengambil bagian bersama kaum laki-laki dalam perjuangan nasional. Malahan kongres mengetengahkan gagasan wanita itu mempunyai tugas khusus membantu kaum miskin.<sup>12</sup>

Tanggal 25-26 Juni 1932 di Yogyakarta diadakan konferensi antar anggota PPII yang berhaluan sama dan dipimpin Sujatin. PPII memutuskan membangun kembali suatu federasi baru, kini dengan 160 organisasi anggota. Federasi tersebut yakni "Istri Indonesia" berasaskan kebangsaan, kerakyatan, dan kenetralan terhadap agama. Tujuannya yakni Indonesia Raya.<sup>13</sup>

Kongres ini juga memperdebatkan tentang reformasi perkawinan, terdapat perpecahan yang jelas diantara organisasi wanita Islam Minangkabau, PERMI dan Istri Sedar.<sup>14</sup> Kongres memutuskan setiap tahun akan diadakan KPI dengan tujuan mencapai hak penuh antara wanita dan laki-laki. Disetujui pula untuk mendorong

---

<sup>11</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 274.

<sup>12</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>13</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm 272.

<sup>14</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 138



organisasi anggotanya melakukan hubungan padu dengan gerakan pemuda nasionalis.<sup>15</sup>

Hal yang terpenting dalam perkembangan PPII ialah keputusan bahwa kesatuan pergerakan wanita Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian ternyata ada organisasi-organisasi wanita baru yang belum menggabungkan diri dengan PPII. Oleh karena itu, timbullah inisiatif untuk kembali mengadakan Kongres Perempuan Indonesia untuk menampung dan menyatukan tenaga dan pikiran kaum wanita Indonesia. Ajakan tersebut mendapat sambutan dari organisasi-organisasi wanita seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

## **B. Kongres Perempuan Indonesia Kedua**

Pada tanggal 6-8 Mei 1933 dipimpin oleh Nyonya Suwandi, PPII mengadakan pertemuan di Jakarta. Para wakil organisasi anggota PPII yang hadir sepakat untuk berinisiatif mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) karena banyak organisasi yang baru dibentuk dan belum menjadi anggota PPII. Organisasi yang baru dibentuk tersebut antara lain Perempuan Sahati yang dibentuk pada 4 Juni 1928 di Jakarta, Perempuan PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dibentuk pada 5

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>16</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 44.

Mei 1928 di Bukittinggi dan Pasundan Istri dibentuk pada 30 April 1930 di Bandung.<sup>17</sup>

Setelah segala persiapan dianggap cukup, panitia Kongres yang antara lain beranggotakan Sri Mangoensarkoro, Suwarni Pringgodigdo, Nyonya Abdurachman dan Nyonya Moh. Husni Thamrin mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Kongres ini dipimpin oleh Sri Mangoensarkoro dan dibantu St Suparto.<sup>18</sup>

Anggota pengurus kongres terdiri dari anggota berbagai perkumpulan wanita yang menjadi anggota kongres. Sehingga KPI II ini bersifat umum dan didukung oleh organisasi wanita dari berbagai aliran dan daerah. Hal ini menghilangkan kekhawatiran bahwa KPI menjadi kongres satu golongan saja.<sup>19</sup> Adapun maksud dari KPI II ini adalah mengeratkan hubungan persaudaraan antara organisasi-organisasi wanita Indonesia, usaha untuk memperbaiki nasib wanita Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.<sup>20</sup>

Pidato-pidato yang dikemukakan pada KPI II antara lain:

1. Arti Pemuda dalam Pergerakan Perempuan Indonesia oleh Emma Poeradiredja.

---

<sup>17</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 424.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>20</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *loc.cit.*

2. Kaum Buruh Perempuan Indonesia oleh Soewarni Pringgodigdo.
3. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam oleh Ratna Sari.
4. Arti Perempuan sebagai Ibu Bangsa oleh Sri Mangoensarkoro.<sup>21</sup>

Beberapa anggota-anggota KPI II adalah organisasi wanita yang datang pada KPI I seperti Wanita Taman Siswa (Yogyakarta), Wanito Utomo (Yogyakarta), Aisyiyah (Yogyakarta), Darmo Laksmi (Salatiga), Santjaya Rini (Solo), Wanito Kencono (Banjarnegara), Wanita Sedjati (Bandung), dan beberapa organisasi baru yakni Kaum Ibu Tuban (Tuban), Mardi Putri (Pemalang), Pasundan Istri (Bandung), Sarekat Putri Islam (Makassar), Perkumpulan Rukun Istri (Tangerang), PERMI bagian Istri (Padang), Persatuan Istri Andalas (Bandung), Istri Sedar (Yogyakarta), Kemajuan Istri (Jakarta), Istri Indonesia (Jakarta), Putri Budi Sejati (Surabaya), Persatuan Putri Indonesia (Surabaya), Kautaman Istri (Medan), Seri Derma (Solo), PSII bagian Istri (Garut), PIKAT (Manado), Komite Pergabungan Guru-guru Sekolah Islam Perempuan dan Sekolah Diniyah Padang Panjang.<sup>22</sup>

Adapun dasar dari KPI II sebagai berikut:

1. Kenasionalan artinya tiap-tiap perkumpulan yang turut haruslah mengakui bahwa Indonesia adalah tumpah darahnya dan bekerja untuk rakyat Indonesia pada umumnya.

---

<sup>21</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 275.

<sup>22</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. (Jakarta: Percetakan Negara, 1958), hlm. 30.

2. Kesosialan artinya segala pembicaraan dan pekerjaan ditujukan kepada perbaikan masyarakat pada umumnya, dengan tiada memasukkan soal agama dan politik.
3. Kenetralan yang berarti bahwa tiap-tiap anggota wajib menghargai pendirian dan haluan masing-masing golongan serta perbedaan dalam paham dan haluan hendaknya dipandang sebagai suatu hal yang dapat menambah luas dan dalamnya pandangan masing-masing.
4. Keperempuan artinya bahwa pekerjaan Kongres harus ditujukan kepada pembukaan segala jalan bagi wanita Indonesia ke arah kemajuan dan ketinggian derajatnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.<sup>23</sup>

Konsep Ibu Bangsa ini penting untuk ditelaah karena dalam KPI II ini ditekankan tentang kewajiban utama wanita Indonesia adalah untuk berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya. Harus dijalin hubungan yang baik antara generasi tua dan generasi muda sehingga tercipta saling pengertian dan saling menghargai dalam rangka keseimbangan antar generasi, karena itu perlu sikap saling menghargai dan tidak menonjolkan diri.<sup>24</sup>

Keputusan-keputusan KPI II antara lain:

1. Dibentuk badan perikatan dengan nama "Kongres Perempuan Indonesia"
2. Tiap-tiap tiga tahun sekali diadakan Kongres Perempuan.

---

<sup>23</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *loc.cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

3. Pencanaan tentang kewajiban semua wanita Indonesia ialah menjadi "Ibu Bangsa" yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.<sup>25</sup>

Menjadi Ibu Bangsa yang baik, kaum wanita harus memiliki pengetahuan yang baik. Salah satu tugas anggota Kongres terkait dengan hal tersebut adalah kewajiban mengadakan usaha Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Untuk kelancaran usaha dibentuk Biro Pendaftaran.<sup>26</sup> Salah satu anggota yang aktif melakukan PBH adalah Aisyiyah.<sup>27</sup> Salah satu usaha badan ini adalah menyusun peraturan pelaksanaan pemberantasan buta huruf.<sup>28</sup>

KPI II juga menaruh perhatian yang besar pada nasib kaum pekerja wanita dan anak-anak. Kongres membentuk suatu badan yang berkewajiban menyelidiki keadaan kaum buruh wanita diseluruh Indonesia. Susunan badan ini diserahkan pada Sri Mangoensarkoro, dimana kelompok penelitian diketuai Sujatin dengan proyek pertama yakni buruh batik di Lasem.<sup>29</sup> Badan ini dinamakan Badan Penyelidik

---

<sup>25</sup> Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 59.

<sup>26</sup> Biro Pendaftaran ini yang bertugas menetapkan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari Ny. S. Sumadi, Ny. Husni Thamrin dan Ny. Sh. Suparto. Lihat dalam Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm 47.

<sup>27</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 425.

<sup>28</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 47.

<sup>29</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 136.

Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI).<sup>30</sup> Para anggota KPI berkewajiban untuk memberi bantuan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan baik dalam pekerjaan maupun perkawinan. Anjuran hidup sederhana juga terus diingatkan agar kelebihan kekayaan pada mereka yang berkecukupan dapat digunakan untuk perjuangan kebangsaan.

Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I. Namun masih ada organisasi wanita yang tidak bergabung dengan KPI II misalnya Istri Sedar yang dipimpin oleh Suwarni Pringgodigdo. Organisasi yang dibentuk tahun 1930 ini semula ikut dalam KPI II. Akan tetapi karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang dianutnya misalnya tentang kedudukan wanita dalam hukum perkawinan Islam yang mengizinkan poligami, Istri Sedar keluar dari KPI II karena Istri Sedar lebih menekankan kepada persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan wanita untuk mempercepat memperoleh kemerdekaan.<sup>31</sup>

Hal lain yang terjadi setelah KPI II berlangsung adalah pembubaran PPII. Pertemuan yang diadakan tanggal 14-15 September 1935 di Yogyakarta menyepakati bahwa PPII membubarkan diri karena asas dan tujuannya sama dengan KPI. Sehubungan dengan itu, semua harta kekayaan PPII termasuk Seri Derma diserahkan kepada KPI yang sudah menjadi badan federasi organisasi-organisasi wanita.

---

<sup>30</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>31</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *loc.cit.*

### C. Kongres Perempuan Indonesia Ketiga

Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938. Kongres ini dipimpin oleh Emma Poeradiredja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Adapun asas dan tujuannya sama dengan KPI II.<sup>32</sup> Asas-asas kemudian dipertegas lagi dengan ditambahkan bahwa untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu Bangsa maka KPI harus menuntut persamaan hak dan harga antara laki-laki dan wanita, persamaan harus didasarkan pada kodrat dan kewajiban masing-masing.<sup>33</sup> Acara-acara yang berlangsung yakni Resepsi yang dibuka oleh ketua Kongres, rapat-rapat tertutup, rapat-rapat umum dan Darmawisata.<sup>34</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dari KPI III ini yakni menyelidiki keadaan masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan urusan wanita, mendirikan badan-badan penyelidikan, mengumpulkan semua catatan-catatan kegiatan dan mengadakan komunikasi dengan organisasi wanita luar negeri.<sup>35</sup>

Pidato-pidato yang dikemukakan pada pelaksanaan KPI III antara lain:

1. Perempuan menjadi Pembangun dalam Segala Bagian Masyarakat Kebangsaan oleh Emma Poeradiredja.
2. Hari Ibu oleh Soekaptinah.
3. Pendidikan Pemuda Kita oleh Roemsari.

---

<sup>32</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*

<sup>33</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 273.

<sup>34</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>35</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 51.

4. Hak Pilih untuk Perempuan oleh Datuk Tumenggung.
5. Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum Perkawinan oleh Maria Ulfah.
6. Masalah Pelacuran oleh Soenarjati Soekemi.<sup>36</sup>

Anggota-anggota KPI III adalah beberapa anggota KPI II seperti Wanita Taman Siswa (Yogyakarta), Wanita Sejati (Bandung), Putri Budi Sejati (Surabaya), dan ditambah dengan beberapa anggota baru seperti Sarekat Istri Jakarta (Jakarta), Panulung Wanodijo (Bandung), Istri Kutaraja (Kutaraja), Persatuan Istri Pegawai Bestuur (P.I.P.B) (Jakarta), Kerukunan Istri Denpasar (Denpasar), Persaudaraan Istri (Bandung), Rukun Setia Istri (Bandung), P.S.I.I bagian Istri (Jakarta) dan Perserikatan Putri Setia Manado (Manado).<sup>37</sup>

Putusan KPI III yakni menetapkan banyaknya suara anggota, membentuk komisi terdiri dari nyonya-nyonya PSII, Istri Indonesia, PIPB dan Maria Ulfah untuk membuat anggaran rumah tangga, KPI tidak menjadi badan yang tetap dan menetapkan anggaran dasar yang baru. Selain itu putusan KPI III terkait dengan pemberantasan buta huruf yakni pekerjaan Badan Pemberantasan Buta Huruf (BPBH) dilanjutkan sebagai badan KPI dibawah pimpinan Nyonya Suparto dan bertempat di Jakarta. Nyonya Suparto diberi kekuasaan untuk menambah pengurus, dan mendirikan *verificatie-comissie* untuk memeriksa kas BPBH.

---

<sup>36</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 275.

<sup>37</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *op.cit.*, hlm. 33.



KPI III juga membuat keputusan tentang kedudukan dalam perkawinan yakni mendirikan komisi untuk membuat rencana peraturan perkawinan, Pekerjaan komisi ini harus selesai dalam satu tahun dan akan dirundingkan dalam Konferensi dari anggota-anggota KPI. KPI III juga akan mengirimkan wakil ke persidangan All Islam Congress yang akan datang dan mengirimkan mosi kepada All Islam Congress yang isinya meminta agar ayat Al-Quran tentang hukum perkawinan hendaknya ditafsirkan dengan sebenarnya seperti perintah Tuhan.<sup>38</sup>

Hal-hal penting yang diputuskan dalam KPI III diantaranya ialah pembentukan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP)<sup>39</sup>, mendirikan komisi untuk membuat rancangan peraturan perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfah Santoso, mendukung P4A dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.<sup>40</sup>

KPI III membentuk sebuah komisi yang akan membuat rancangan peraturan perkawinan. Adapun anggotanya antara lain Maria Ulfah Santoso, Nyonya Rangkyo Datuk Tumenggung dari Persatuan Istri Pegawai Bumiputra (PIPB), S. Arujikartawinata dari Partai Sarekat Islam Indonesia bagian Wanita, Zahara Gunawan

---

<sup>38</sup> Kongres Wanita Indonesia, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>39</sup> Badan ini bertugas meneruskan biro konsultasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun suatu rancangan undang-undang perkawinan bagi umat Islam. Lihat dalam Taufik Abdullah, dkk (ed), *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2010), hlm. 373.

<sup>40</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *loc.cit.*

dari Sarekat Istri Jakarta, Nyonya M. Wiria Atmaja dari Pasundan Istri dan Nyonya Kasman dari JIBDA.<sup>41</sup>

Berbagai isu yang dibahas dalam kongres ini masih sangat relevan dengan kehidupan kaum wanita saat ini. Masalah peraturan perkawinan yang sangat diperlukan sebagai perlindungan bagi wanita yang sering kali hak-haknya terabaikan merupakan isu utama yang selalu dibicarakan oleh organisasi-organisasi wanita. Demikian juga halnya dengan perdagangan wanita dan anak-anak baik yang nyata maupun terselubung menjadi perhatian dan kepedulian wanita hingga masa kini.

Masalah reformasi perkawinan diangkat kembali oleh KPI III, ketika itu Maria Ulfah membela Undang-Undang perkawinan modern yang tidak menentang hukum Islam. Didirikanlah Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPPI) yang diketuai oleh Maria Ulfah dan menyusun rancangan semacam itu.<sup>42</sup>

Tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan wanita, didirikan "Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia" (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada wanita dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi.<sup>43</sup>

Sebagai tindak lanjut pembicaraan yang tidak menjadi keputusan KPI III ini pemerintah kolonial Belanda tahun 1938 memberikan hak untuk dipilih (*passief*

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 409.

<sup>42</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 140.

<sup>43</sup> Kongres Wanita Indonesia, *loc.cit.*

*kiesrecht*) kepada kaum wanita Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Kota (*Gemeente Raad*) pada 4 orang wanita terpilih yakni Emma Poeradiredja di Bandung, Sri Umiyati di Cirebon, Nyonya Sunaryo Mangunpuspito di Semarang dan Siti Sundari Sudirman di Surabaya.

#### **D. Kongres Perempuan Indonesia Keempat**

Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Nyonya Sunaryo Mangunpuspito.<sup>44</sup> Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia.<sup>45</sup> Maksud dan asas kongres seperti pada KPI III.<sup>46</sup> Acara-acara KPI IV yakni: resepsi, rapat-rapat tertutup dan rapat-rapat umum.

Susunan pengurus KPI IV:

Ketua : Nyonya Sunaryo Mangunpuspito.

Wakil Ketua : Nyonya Darmowinoto.

Penulis I : Nyonya Pudjotomo.

Penulis II : Retnomaendro.

Bendahari : Nyonya Munandar.

Pembantu : Nyonya Ngamdani.

Nyonya Sudjono D. Puspongoro

Nyonya Suyatno.

---

<sup>44</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *loc.cit.*

<sup>45</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>46</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *loc.cit.*

Nyonya Kridoharsojo.<sup>47</sup>

Pidato-pidato yang dikemukakan pada pelaksanaan KPI IV antara lain:

1. Indonesia Berparlemen oleh Emma Poeradiredja.
2. Berbangsa dan Berbahasa Satu oleh Ibu Sjafii.
3. Masyarakat Perempuan dan Jurnalistik oleh Herawati Latip.
4. Hak Waris Indonesia oleh Mr. Ani Abas Manopo
5. Kewajiban Alimentasi oleh Maria Ulfah.<sup>48</sup>

Anggota-anggota KPI IV yakni Pasundan Istri, Puspo Rinontje, Sarekat Istri Indonesia, Budi Rini, Puteri Budi Sejati, Wanito Taman Siswa, Santjaya Rini, Persatuan Puteri, Aisyiyah, JIBDA, Partai Sarekat Islam Indonesia departemen Pergerakan Istri, Susilo Retno, Istri Indonesia.<sup>49</sup>

Kongres menyatakan mendukung penuh tuntutan "Indonesia Berparlemen" dari GAPI serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang.<sup>50</sup> Kongres juga menuntut hak pilih penuh bagi wanita Indonesia. Suatu badan pekerja dibentuk guna memerangi buta huruf, lowongan kerja bagi wanita Indonesia. Rancangan Undang-Undang perkawinan berdasar Islam disusun, juga tentang peningkatan ekonomi kaum wanita umumnya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 275.

<sup>49</sup> Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, hlm. 34.

<sup>50</sup> Saskia Eleonora Wieringa, *loc.cit.*

Masalah-masalah besar yang dihadapi kaum wanita Indonesia tetap menjadi perhatian utama dan masuk menjadi agenda dalam Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV). Perhatian organisasi-organisasi wanita yang menjadi anggota KPI tetap besar membuat mereka semakin bersemangat memperjuangkan bukan saja hak-hak wanita, melainkan juga hak-hak bangsa secara menyeluruh.<sup>51</sup>

Keputusan-keputusan KPI IV:

- a. Mengajukan kepada anggota-anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) supaya mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran sekolah-sekolah menengah atas.
- b. Mendesak kepada Fraksi Nasional dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*) dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar hak memilih (*actief kiesrecht*) anggota Dewan Kota dari golongan Indonesia juga diberikan untuk kaum wanita.
- c. Kongres setuju dan akan membantu aksi GAPI ke arah Indonesia Berparlemen.
- d. Kongres setuju dengan penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer terbatas bagi bangsa Indonesia.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 426.

<sup>52</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 274

## **BAB V KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan yakni:

1. Timbulnya pergerakan nasional dimulai abad ke XIX dengan diberlakukannya Politik Etis yang merupakan ide dari Van Deventer yakni irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hasil dari adanya pendidikan ini adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian bersama-sama mendirikan Budi Utomo. Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan wanita telah dirintis oleh Kartini dengan ide-ide yang cemerlang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo turut serta membawa perbaikan bagi kaum wanita.

Periode pergerakan wanita terjadi dalam tiga periode yakni pergerakan wanita sebelum tahun 1920, pergerakan wanita tahun 1920-1930 dan pergerakan wanita setelah tahun 1930. Pergerakan wanita sebenarnya bahkan terjadi sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda sampai pada saat ini. Pergerakan wanita sebelum tahun 1920/awal abad XX identik dengan pergerakan dalam bidang sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi

kecakapan sebagai seorang ibu. Walau pergerakan wanita pada masa permulaan itu adalah gerak perorangan dan tidak dalam susunan perkumpulan, namun itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan. Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang melangkah kearah pergerakan politik. Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama antara organisasi sosial dan politik. Ketiga jenis perkumpulan (militer, sosial, dan pemuda terpelajar) walau memiliki perbedaan corak budayanya namun semuanya dapat bekerjasama. Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional. Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah menjadi organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri.

2. Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, kaum wanita yang aktif dalam organisasi-organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat persatuan dan kesatuan yang terus berkembang menjadi dasar bagi meningkatnya semangat dan kesadaran nasional. Gagasan tersebut terwujud dalam Kongres Perempuan Pertama. Organisasi-organisasi pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia yakni Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), *Jong Java Dames Afdeeling*, Wanita Katholik, Aisyiyah, dan Putri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia Pertama

dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta dimana Yogyakarta merupakan tempat tinggal para pemrakarsa. Kongres ini di prakarsai oleh tiga orang tokoh wanita yakni: Ny. Sukonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa dan Ny. Suyatin Kartowiyono dari Puteri Indonesia. Kongres ini dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita.

Acara kongres berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Hal yang menarik dari pidato-pidato dalam kongres ini bukan hanya isinya yang berbeda-beda namun juga adanya aneka ragam gaya pidato. Tujuan diadakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kehidupan wanita Indonesia. Kongres ini memutuskan untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan hendak mendirikan *Studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu dan memberantas perkawinan anak-anak.

3. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia yakni Perikatan Perempuan Indonesia yang didirikan tanggal 25 Desember 1928. Nama federasi kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Antara KPI I dan KPI II diadakan 3 kali Kongres PPII. Pada tanggal 6-8 Mei 1933 dipimpin oleh Ny. Suwandi, PPII mengadakan pertemuan di Jakarta. Para wakil organisasi anggota PPII yang hadir sepakat untuk berinisiatif mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) karena banyak organisasi yang baru dibentuk dan belum menjadi anggota PPII. Setelah segala persiapan dianggap cukup, panitia Kongres yang antara lain beranggotakan Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ny.



Abdulrachman dan Ny. Moh. Husni Thamrin mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I.

Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung tanggal 23-27 Juli 1938 yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Berbagai isu yang dibahas dalam kongres ini masih sangat relevan dengan kehidupan kaum wanita saat ini. Masalah reformasi perkawinan diangkat kembali oleh KPI III. Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Kongres menyatakan mendukung penuh tuntutan "Indonesia Berparlemen" dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmaddani G. Martha. (1992). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Indo-Media Communication.
- Bambang Suwondo, dkk. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Bimo Walgito. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Blackburn, Susan. (2007). *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Cahyo Budi Utomo. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Dadang Supardan. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzie Ridjal, dkk (ed). (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ki Hajar Dewantara. (1952). *Dari Kebangunan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Endang.
- Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- \_\_\_\_\_. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Leiriza, R.Z. dkk. (1989). *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 I: dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nani Soewondo. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia-Indonesia.
- Ohorella, G.A . (1992). *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Pringgodigdo, A.K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Hajar Nur Setyowati. (2008). *Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa*. Jakarta: I:BOEKOE.
- Sagimun MD. (1989). *Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet Mulyono. (1969). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Djilid II*. Jakarta : P.N Balai Pustaka.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi Vol. 1*. Jakarta: Panitia Penerbit.

- Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sudiyo. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujatin Kartowijono. (1982). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Sukanti Suryochondro. (1984). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suratmin dkk. (1991). *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Taufik Abdullah, dkk (ed). (2010). *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wieringa, Saskia Eleonora. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.

### **Artikel**

- Maria Muharam Wiranatakusuma. (1984). "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, hlm. 271-291.

### **Skripsi**

- Hajar Nur Setyowati. (2008). *Gerakan Politik Perempuan 1930-1941, Studi Komparasi Gerakan Politik Istri Sedar dan Kongres Perempuan Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Indah Firdaningsih. (2010). *Kongres Perempuan Indonesia II, 20-24 Juli 1935 di Jakarta*. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Gambar Panitia inti Kongres Perempuan Indonesia Pertama.



Sumber.

Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lampiran 2. Gambar R.A. Soekonto, Ketua Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

Gambar R.A. Soekonto, Ketua Kongres Perempuan Indonesia Pertama.



Sumber.

Suratmin dkk. (1991). *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Lampiran 3. Gambar Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta

Gambar Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta.



Sumber.

Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.



Lampiran 4. Gambar Diorama Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

Gambar Diorama Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama.



Sumber.

Dokumentasi Pribadi, koleksi Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Yogyakarta.

Lampiran 5. Gambar Dalem Joyodipuran, Tempat Pelaksanaan Kongres

Gambar Dalem Joyodipuran, Tempat Pelaksanaan Kongres



Sumber.

Dokumentasi Pribadi, koleksi Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Yogyakarta.

Lampiran 6. Gambar Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung, 1938

Gambar Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung, 1938



Sumber.

Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lampiran 7. Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama

- Ketua : R.A Soekonto dari Wanita Utomo
- Wakil Ketua : St. Mundjiah dari Aisyiyah
- Sekretaris I : St Sukaptinah dari JIBDA
- Sekretaris II : Sunarjati dari Puteri Indonesia
- Bendahara I : R. A. Hardjodiningrat dari Wanita Katholik.
- Bendahara II : Sujatin dari Puteri Indonesia
- Anggota : Nyi Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa
- Nyonya Drijowongso dari Wanita PSII
- Nyonya Muridan Noto dari Wanita PSII
- Umi Salamah dari Wanita PSII
- Djohanah dari Aisyiyah
- Badiah Murjati dari Jong Java Dames Afdeeling
- Hajinah dari Aisyiyah
- Ismudiati dari Wanita Utomo
- R.A Mursandi dari Wanita Katholik

Sumber.

Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.